

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILUKADA DI
KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:
FAISAL
NIM 10538 2909 14**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Asbar**, NIM **10538274313** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 097 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Sabtu, 29 Juni 2019.

23 Syawal 1440 H
Makassar, -----
28 Juni 2019 M

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. M. Rahman Rahim, S.E., M.M.

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Bahriullah, M.Pd.

Penguji

1. Drs. H. Nurdin, M.Pd.

2. Rafaisal, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Abdul Aziz Muslimin, M.Pd.

4. Namsudin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar

Nama : Asbar

NIM : 10538274313

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Syawwal 1440 H
Makassar,
28 Juni 2019 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Sakri Svanisuri, S.Hun.

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

- A 1 Angket Pertanyaan
- A 2 Hasil Wawancara

LAMPIRAN E

- B 1 Dokumentasi
- B 2 Persuratan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana program studi sosiologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan draft sampai skripsi ini rampung, banyak hambatan, rintangan dan halangan, namun berkat bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya melainkan awal dari semuanya, awal dari perjuangan hidup dan awal dari sebuah doa yang selalu menyertainya. Aamiin.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua serta saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang, motivasi baik moral maupun materil dengan penuh keikhlasan serta doa restunya yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Erwin Akib, M.Pd., Ph. D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Drs. H. Nurdin. M.Pd. Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kaharuddin, S.Pd.,M.Pd., Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi.
5. Dr. Eliza Meiyani, M. Si sebagai Pembimbing I dan Dr. Budi Setiawati, M. Si sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan skripsi, sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Dra. Hj. Syaribulan K., M. Pd. sebagai Penasehat Akademik (PA), yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan dan petunjuknya selama ini terkait aktivitas akademik.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah menyalurkan ilmunya secara ikhlas serta mendidik penulis.
8. Drs. Zainal Abidin. M.Si selaku kepala sekertaris KPU, Bapak/Ibu staf-staf yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama melakukan penelitian.
9. Muhammad Gazali, SH selaku kepala sekertaris DPRD, Bapak/Ibu staf-staf yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama melakukan penelitian.
10. Rekan seperjuangan Jurusan Pendidikan Sosiologi Angkatan 2014 terkhusus Kelas A Universitas Muhammadiyah Makassar, terima kasih atas solidaritas yang diberikan selama menjalani perkuliahan, semoga keakraban dan kebersamaan kita tidak berakhir sampai disini.
11. Sahabat-sahabatku dan teman-teman ku semua dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang banyak membantu terima kasih karna kebersamaan dengan kalian merupakan hal terindah dalam menjalani pasang surut kehidupan di bangku perkuliahan.
12. Para Sahabat, Rekan, Kakanda Dan Adinda terima kasih atas motivasi yang telah diberikan selama menyelesaikan program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun itulah usaha penulis yang maksimal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya yang akan datang. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Makassar, Februari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Politik.....	7
2. Konseptualisasi partisipasi politik	9
3. Tipologi partisipasi politik	11
4. Faktor pendorong partisipasi politik	16
5. Partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik.....	22
6. Budaya politik.....	24
7. Perspektif perempuan dalam politik	26
B. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi penelitian	35
C. Informa Penelitian.....	36
D. Fokus Penelitian.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Jenis dan Sumber Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	41
I. Keabsaan Data.....	43
BAB IV GAMBAR DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi kantor KPU dan DPRD Kabupaten Pangkep	44
1. Kantor KPU	44
2. Kantor DPRD di Kabupaten Pangkep	45
3. Kondisi geografis dan iklim kabupaten pangkep.....	45
4. Topografi, geologi dan hidrologi	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAH	
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan	53
2. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.....	55
B. Pembahasan	
1. Revolusi Fisik	66
2. Sejarah Pemerintahan Daerah.....	73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	80
B. SARAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. di negara berkembang upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi politik perempuan warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan.

Seiring dengan era reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya. Menurut Sanit (1985:203) bahwa anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama di bidang politik. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.

Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada perbedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas

pemerintahan. Semua hal tersebut tentunya dilaksanakan dengan cara-cara dan mekanisme yang telah diatur oleh sistem pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam system demokrasi menuntut keterlibatan warga negara di dalamnya. Adapun aturan main dalam sistem demokrasi nasional salah satunya adalah pemilu. Kegiatan pemilu sendiri ditujukan sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Undang-undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Pemilu dilangsungkan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia meskipun di beberapa daerah-daerah tertentu harus menyusul akibat keterlambatan logistik yang sampai ke daerah pemilihan.

Pemilu tahun 2018 merupakan peristiwa yang bersejarah dalam perjalanan kehidupan Sulawesi selatan yang akan datang. Pelaku-pelaku yang terlibat di dalam penuksesannya menarik untuk dikaji. Selama ini para peneliti dan ilmuwan seringkali mengangkat tema-tema pemilu sebagai bahan kajian ilmiah, namun sebagian besar yang menjadi fokus adalah tentang sistem, partai politik, ataupun pemilih secara umum. Penelitian tentang pemilu dilakukan oleh Kamarudin (2003) dengan judul *Partai Politik Islam di Pentas Pemilu; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2018*. Kamarudin mendeskripsikan tentang perkembangan politik Islam sejak tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto dan munculnya kembali partai-partai politik Islam serta secara gamblang dijelaskan melalui angka-angka hasil pemilu 1999 bahwa kekuatan politik Islam tidaklah sebesar kesan yang dipancarkan. Sementara itu, hasil penelitian disimpulkan bahwa interaksi sosial masyarakat di Kabupaten Pangkep berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan terhadap masyarakat. Pengaruh itu berasal dari interaksi yang terjadi dalam keluarga, tempat bekerja, organisasi-organisasi kaum perempuan kemasyarakatan, dengan tokoh agama berperan sebagai tokoh politik sehingga berpengaruh terhadap politik perempuan dalam masyarakat dalam pemilu 2018 memiliki

banyak sisi yang unik untuk dikaji. Salah satunya adalah keterlibatan perempuan dalam pemilu. Pemilu dan perempuan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena membahas tentang pemilu kuranglah lengkap bila tanpa menyertakan perempuan di dalamnya.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestic dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat pusat tetapi juga berimbas pada tingkatan lokal atau daerah. Terlebih lagi bahwa posisi kaum perempuan kurang diuntungkan secara politis karena jarang sekali terlibat dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan perempuan itu sendiri.

Peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Kini gerbang demokrasi telah terbuka dengan lebar dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 No. 12 Pasal 65 yang mengatur tentang kuota 30% sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislative adapun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pemilihan serentak. oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak kuantitas perempuan di wilayah publik. Pemilu 2015 memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan, ada banyak peran yang dapat dilakukan dalam proses penting kenegaraan tersebut. Bagaimanapun juga perempuan merupakan salah satu *wujud* yang memiliki

potensi, kemampuan, dan kelebihan yang tidak kalah dengan laki-laki. Atas dasar kenyataan inilah kemudian peneliti mengambil judul **“Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dalam Pemilu Tahun 2015”**.

Pemilu Tahun 2015 merupakan peristiwa penting dalam sejarah dalam menentukan kepala daerah Sulawesi selatan ketatanegaraan kita. Sebagian pengamat menilai bahwa pemilu tersebut merupakan pemilu yang sangat demokratis setelah Pemilu Tahun 1955 dilaksanakan. Baru kali pertama dalam sejarah nasional bahkan di dunia pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif. Banyak hal yang membuat kalangan tertarik untuk mengkaji karena permasalahan dalam pemilu bukan hanya permasalahan yang terbatas pada kampanye, pemberian suara, penghitungan suara, konflik massa ataupun gerakan-gerakan protes dari ketidakpuasan kontestan pemilu, tetapi pemilu merupakan media pendidikan politik bagi warga negara. Pemilu dilaksanakan serentak di semua daerah dan secara umum pemilu tahun 2013 berhasil dengan sukses, namun dibalik kesuksesannya yang besar itu masih meninggalkan permasalahan yang belum dapat dituntaskan. Bukan hanya berada pada tingkat pusat, namun sampai pada wilayah-wilayah lokal. Di Sulawesi Selatan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan sukses. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran semua pihak terutama masyarakat sebagai factor pendukung dan penentu dengan melakukan partisipasi politik perempuan di dalamnya.

B. Rumusan masalah

Dengan melihat latar belakang dan identifikasi di atas, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik perempuan di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana faktor-faktor partisipasi politik perempuan di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik perempuan di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor partisipasi politik perempuan di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi khususnya tentang perempuan dalam sistem politik.
2. Manfaat praktis, bermanfaat bagi peningkatan dan penguatan partisipasi politik perempuan khususnya pada tingkat mikro di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Politik

Politik menurut Aristoteles (dalam Takariawan, 2002:48). adalah segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat. Ia meliputi semua urusan yang ada dalam masyarakat; sudut pandang ini meletakkan politik sebagai bagian dari moral atau akhlak Dalam terminologi Arab, secara umum dipahami bahwa kata *siyasah* (politik) berasal dari Bahasa *as saus* yang berarti *ar riasah* (kepengurusan). Jika dikatakan *saasa al amra* berarti *qaama bihi* (menangani urusan). Syarat bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini adalah ia melakukan sesuatu yang membawa keuntungan bagi sekumpulan orang (Takariawan, 2002:49). Sebagian masyarakat Barat memahami politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau system pemerintahan. Politik didefinisikan sebagai seni mengatur negara, hubungan antar negara, juga hak-hak warga negara dalam mengatur urusan kenegaraan. Ada juga yang mengaitkan politik sebagai aktivitas kelompok dalam masyarakat, misalnya partai politik. (Takariawan, 2002:47). Menurut Iswara (1980:42) politik adalah “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan” atau “masalah-masalah pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan,” atau “pembentukan dan penggunaan kekuasaan.” Dalam hal ini hakekat dari politik adalah kekuasaan dan dengan begitu proses politik merupakan serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasari atas kekuasaan. Banna (2000:127) menyebutkan politik adalah hal memikirkan persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Sisi internal adalah mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritisi jika

mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan sisi eksternal dalam wacana Banna adalah memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menghantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan- urusannya. Karena persepsi semacam inilah Banna dengan tegas mengatakan bahwa seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi politikus, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa. Perbedaan-perbedaan definisi di atas oleh Budiardjo (2002:9) dikatakan sebagai akibat pandangan sarjana dalam menepi politik dari satu aspek atau unsur dari politik saja. Menurutnya konsep-konsep pokok dari politik seperti yang di kemukakan oleh para ahli di atas sebenarnya terdiri dari konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa cakupan aktivitas politik itu luas. Mulai dari aktivitas individual yang memproses perubahan, sampai aktivitas kolektif dalam partai politik atau dalam urusan pemerintahan. Keseluruhannya masuk wilayah pengertian politik

2. Konseptualisasi Partisipasi Politik

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas system politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu

sendiri (Berger dalam Surbakti, 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Khamisi (dalam Ruslan 2000:46) memberikan pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-oraganisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri. Sementara menurut Huntington dan Nelson (1994:9) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Dari konsep ini me mang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi. Hal ini terjadi menurut Huntington dan Nelson (dalam Kamarudin, 2003:94), disebabkan oleh sejumlah alasan berikut:

Pertama, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip dari pada di alam realitas. *Kedua*, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. *Ketiga*, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi. Keempat, kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan

menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik. Di samping konseptualisasi dari partisipasi politik di atas, Lane (dalam Rush dan Althoff, 2000:181) menyatakan bahwa Partisipasi politik juga memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis,
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial,
- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus,
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu.

3. Tipologi Partisipasi Politik

Surbakti (1992:141-142) mengkategorikan kegiatan partisipasi politik dengan sejumlah kriteria “rambu-rambu” yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri. *Pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. *Kedua*, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi politik. *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat

dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi. Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah (Surbakti, 1992:142). Dengan kata lain lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput). Sementara itu, Milbrath dan Goel (dalam Surbakti, 1992:143) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama, apatis*, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua spektator*, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga, gladiator*, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka,

aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. *Keempat*, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi (dalam Ruslan 2000:105), dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni (1) Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik. Inilah bentuk konkret partisipasi aktif. (2) Non Partisipan politik. Inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian ini semakin besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidakpedulian politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian masyarakat. Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik. Bentuk konkret sikap ini dapat dilihat pada tiga fenomena yaitu (1) Ketidakpedulian politik. Yaitu tidak memberikan perhatian terhadap yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepatuhan kepada segala yang datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidakmampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman. (2). Keraguan politik. Yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktivitas politik adalah pekerjaan buruk (3). Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi. Menurut Olsen (dalam Surbakti, 1992:143) partisipasi dapat dipandang sebagai dimensi utama stratifikasi

sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal, (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan system politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). Dalam perspektif lainnya, Roth dan Wilson (dalam Budiardjo, 1981:6) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. Karena seperti piramida, bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilu. Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat yang terletak di tengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. Kelompok terakhir yang terletak di bagian paling atas dari piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis. Warga yang termasuk dalam kategori aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis ini adalah seperti: menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai/kelompok kepentingan. Di samping itu, ada juga warga yang tidak termasuk dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Mereka ini oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang

yang apolitis.

4. Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Tinggi rendahnya partisipasi warga dalam proses politik suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak? (Surbakti, 1992:144).

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Kedua faktor di atas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, *afiliasi politik* orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang di

maksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah. Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas politik juga tergantung tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui :

- a. Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal.
- b. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut.
- c. Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini biasanya menyebabkan individu berkembang wawasan politiknya dan ikut andil dalam persaingan politik, sehingga mendorongnya untuk bergabung kepada suatu partai atau kelompok politik tertentu, atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
- d. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat memecahkan problematikanya.
- e. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi (Sa'd dalam Ruslan, 2000:102-103).

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi (dalam Ruslan 2000:101-102) bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik. Faktor jenis individu: laki-laki atau perempuan, juga berpengaruh besar terhadap partisipasi politik di sebagian masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan. Semua itu sering disebut sebagai faktor-faktor sosial.
- b. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik, seperti kultur yang biasa digambarkan oleh alegori rakyat di desa-desa yang ada di Mesir. Misalnya ungkapan “Yang penting bisa makan, sambil menuju ajal”
- c. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya. Weber dalam Rush dan Althoff (2000:181) mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut :

- a. Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok,
- b. Efektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau entusiasme terhadap suatu ide, organisasi, atau individu,
- c. Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial,
- d. Rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi. Menurut Huntington dan Nelson (1994:22) sebab-sebab partisipasi politik bahwa dalam teori, kecenderungan-kecenderungan dan kelompok-kelompok oleh adanya cara-cara alternatif yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebab-sebab seseorang menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politiknya adalah berbagai motivasi yang ada pada kelompoknya dan dirinya, tentang bagaimana caranya agar tujuan-tujuannya tercapai melalui saluran-saluran politik yang ada. Adalah tidak terelakkan bahwa dalam mengaktualisasikan partisipasi politik dibutuhkan media. Huntington dan Nelsen (dalam Kamarudin, 2003:95) melihat basis partisipasi politik dapat bersifat individual atau kelompok. Basis kolektif terbagi atas lima bagian yakni kelas, kelompok komunal, lingkungan, partai politik, dan golongan. Kelas adalah pengelompokan individu atas status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Kelompok komunal diartikan sebagai pengelompokan individual karena persamaan ras, agama, bahasa, dan etnis. Lingkungan adalah individu-individu yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain. Partai politik adalah individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif. Adapun golongan diartikan sebagai individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus dan intens satu

sama lain, salah satu manifestasinya berupa pengelompokan patron-klien. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik ini dapat terwujud dengan dalam pelbagai bentuk, namun hal yang menjadi semestinya menjadi pertimbangan utama adalah efektifitas dan efisiensi cara dan alternatif dari bentuk partisipasi politik yang dipilih.

5. Partisipasi Politik Sebagai Akibat dari Sosialisasi Politik

Manufi (dalam Ruslan, 2002:74) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi –dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda- sebagai anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat. Ada beberapa definisi mengenai konsepsi sosialisasi yang berkisar pada keberadaannya sebagai proses instruksi, penanaman dan pengajaran, atau bahwa ia adalah proses untuk mendapatkan sesuatu. Menurut Greinstein (dalam Ruslan, 2000:75) bahwa sosialisasi politik adalah “instruksi formal maupun non formal, terencana maupun tidak terencana, akan berbagai pengetahuan, nilai, dan perilaku politik, serta karakter kepribadian yang mempunyai muatan politik. Itu terjadi pada setiap periode kehidupan melalui lembaga-lembaga politik dan social yang ada di tengah masyarakat. Eric Rome (dalam Ruslan, 2000:75) berpendapat bahwa ia adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi transformasi berbagai nilai, keyakinan, dan perasaan, yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke generasi. Dimulai sejak usia dini dan terus berlangsung sepanjang hidup. Sementara keluarga, sekolah, gereja, kelompok-kelompok kerja, dan partai-partai politik merupakan agen-agen demi terciptanya proses tersebut. Sementara itu tujuan sosialisasi politik menurut Ghanim (dalam Ruslan, 2000: 76) adalah untuk mengembangkan individu sebagai person politik atau pribadi politik. Yakni sejumlah orientasi yang terbentuk dalam diri individu untuk menghadapi dunia politik, termasuk di dalamnya pandangan tentang peran

politiknya secara khusus Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang bertujuan membentuk kepribadian politik, dalam arti bahwa seseorang memperoleh orientasi politik yang memiliki tiga unsur: nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mendasar, pengetahuan dan informasi serta perspektif-perspektif politik, serta perasaan dan emosi berikut orientasi-orientasi politik. Oleh sebab itu, ia merupakan proses dimana perubahan kultur tertentu menuju orientasi dan praktek politik terjadi. Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik mensyaratkan adanya sosialisasi politik yang harus dialami oleh setiap individu. Karena tanpa adanya sosialisasi politik tidak akan mengakibatkan terjadinya partisipasi politik (Rush dan Althoff, 2000:19). Pengalaman yang diperoleh melalui sosialisasi politik akan menciptakan perilaku dan orientasi individu dalam aktivitas politik, di samping menentukan sejauhmana partisipasi politiknya. Faston dan Dennis (dalam Rush dan Althoff, 2000:20) mengutarakan tahapan dalam proses sosialisasi politik, yaitu :

- a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, anak, presiden, dan polisi.
- b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu pejabat swasta dan pejabat negara. Rendahnya kualitas partisipasi warga negara Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang rendah menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka miliki. Rendahnya intensitas sosialisasi tersebut dapat disebabkan oleh budaya (politik maupun non politik) yang tidak menguntungkan mereka. Budaya politik dan non politik yang tertanam langsung sejak masa kanak-kanak, baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarga, menghasilkan sosialisasi politik dan pemahaman yang rendah kadarnya.

6. Budaya Politik

Salah satu aspek penting dalam sistem politik yang memberikan

pengaruh dalam proses sosialisasi politik adalah adanya budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuannya yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik (Budiardjo, 2002:49). Pye (dalam Ruslan, 2000:79) berpandangan bahwa budaya politik merupakan sejumlah orientasi, keyakinan, dan perasaan, yang memberikan sistem dan makna bagi proses kegiatan politik, juga memberikan kaidah-kaidah baku yang mengatur tindakan-tindakan individu di dalam system politik. Orientasi terhadap tema-tema politik menurutnya menyangkut tiga aspek yakni: (1) *Aspek kognitif*, sekitar akurat atau tidaknya pengetahuan individu tentang sistem politik. Ia mencakup beberapa unsur, seperti kesadaran politik; (2) *Aspek afektif*, yaitu orientasi-orientasi perasaan terhadap politik, atau dengan kata lain, perasaan menerima atau menolak hal-hal yang bersifat politik; dan (3) *Aspek evaluative*, yaitu meliputi apresiasi dan pandangan seputar persoalan-persoalan politik, dan penilaian terhadap system politik (*trias politika*, *pressure group*, partai-partai politik). Dikemukakan pula oleh Almond dan Verba (dalam Sastroatmodjo, 1995: 48-50) bahwa budaya politik terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Budaya Politik Parokial*

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas tetapi peran yang satu dilakukan dengan peran yang lain baik dibidang sosial, ekonomi

maupun keagamaan.

b. *Budaya Politik Subjek*

Dalam budaya politik subjek masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah, keputusan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi, menerima, setia, dan loyal kepada pemimpin.

c. *Budaya Politik Partisipan*

Masyarakat dalam budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan untuk sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Dengan demikian bahwa budaya politik dapatlah dipandang sebagai kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan yang dihayati oleh para anggota sistem politik.

7. Perspektif Perempuan dalam Politik

Diskursus mengenai perempuan terlibat dalam politik memunculkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian hadirnya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa. Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai berikut :

a. **Politik Perempuan dalam Perspektif Gender**

Dalam perspektif gender yang di usung oleh kalangan feminis terdapat adagium yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktural maupun kultural dapat ditiadakan

(Verayanti, 2003:39) Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga politik formal yang akan mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak sensitif gender. Misalkan saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya (Ani, 2005:xxx). Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang membuat undang-undang (Muslikhati, 2004:69)

Tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) menambahkan satu indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, jika sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP (*Growth Domestic Product*) kini ditambah dengan HDI (*Human Development Index*) yang salah satu ukurannya adalah konsep kesetaraan gender (*gender equality*). Dikatakan bahwa faktor kesetaraan gender harus selalu diikuti

dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (*Gender Development Index*), yaitu kesetaraan antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta GEM (*Gender Empowerment Measure*), yang mengukur kesetaraan dari partisipasi politik (*Human Development Report*, 1995). Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan *affirmatif action* yaitu kuota 30 % bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003. Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang bersikap pro maupun kontra terhadap ide tersebut. Bila menelusuri perjuangan kaum feminis di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sebuah rentetan sejarah dan ideologis yang menyertainya. Menurut Bahsin dan Khan (dalam Muthali'in, 2001:41) bahwa munculnya feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemeerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut Gerakan feminisme sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai di Barat sejak abad XVII, namun mengalami pasang surut. Baru pada tahun 1960-an, khususnya di Amerika mulai marak kembali dengan skala pengkajian dan penyebaran lebih intens dan meluas (Dewi dalam Muthali'in, 2001:42). Dalam kurun waktu itu dikenal berbagai aliran atau sebutan gerakan feminisme, seperti *Socialist feminis*, *sof feminis movement*, *radikal feminis*, *liberel feminis*, dan *womens'lib* (Fakih, 2005:81-98). Menurut Hubies (dalam Muthali'in, 2001:42) bahwa feminisme memiliki dasar preposisi sebagai berikut : (a) Feminisme muncul sebagai reaksi kesadaran

beroposisi terhadap fitnah dan ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan dalam bentuk oposisi dialektis terhadap praktek *mysogini* atau kekerasan laki-laki terhadap perempuan; (b) Ada keyakinan dalam masyarakat yang perlu diretas, dinyatakan bahwa identitas sosial jenis kelamin bersifat kultural, bukan berifat biologis; (c) Berkeyakinan bahwa adanya kelompok sosial perempuan merupakan penegas eksistensi kelompok social laki-laki, dalam arti bahwa kelemahan atau kelebihan kelompok jenis social kelamin tertentu sekaligus pula menampakkan kelemahan dan kelebihan kelompok sosial jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada jenis kelamin tertentu yang mutlak dalam kehidupan sosial; (d) Adanya kesamaan sudut pandang dalam melihat dan memahami warisan sistem nilai yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis kelamin yang dikonstruksi oleh budaya; (e) Adanya keinginan untuk menerima konsep manusia dan prikemanusiaan secara lebih hakiki. Preposisi di atas memberikan penjelasan bahwa setiap manusia memiliki peluang dan kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, khususnya pada perempuan. Dengan demikian bahwa pandangan para feminisme mengenai keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu manifestasi gerakan untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan perempuan dari penindasan dan ketidakadilan.

b. Politik Perempuan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam keterlibatan perempuan dalam bidang politik memiliki *epistemologis* bahwa pada hakikatnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ragam kegiatan politik. Sehingga dalam hal perempuan berpolitik tidaklah menjadi masalah manakalah

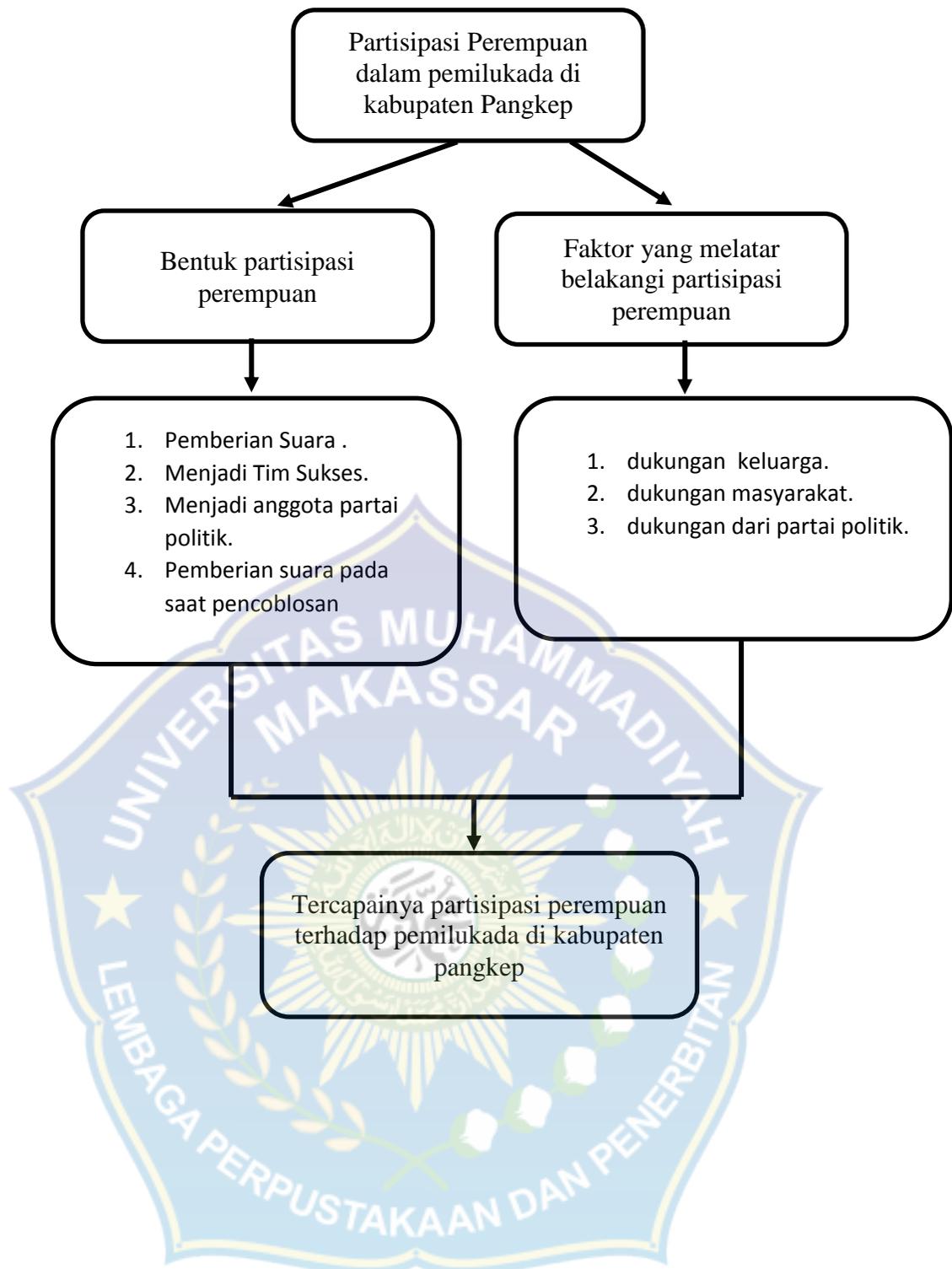
memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam agama, ijtihad ulama kontemporer serta mencontoh dari aktivitas para sahabat Rasulullah dari kalangan wanita (Ridha, 2004:26). Landasan fundamental merupakan *legitimasi* hukum yang tercantum dalam ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung *mission statement* bagi setiap muslim secara umum. Sedangkan contoh aktivitas politik sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita dapat dijadikan sebagai bukti untuk menepis keraguan sebagian kalangan tentang hukum keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Tentang ijtihad ulama mengenai peran politik perempuan seperti di ungkapkan oleh Ghazali dalam Ridha (2004:26) bahwa perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak untuk memegang jabatan keanggotaan di majelis itu, juga hak untuk memegang tampuk kepemimpinan selain *imamah kubra* (khalifah) dan derivatnya. Dengan demikian dapat ditarik sebuah perbedaan yang mendasar antara kedua perspektif ini, bahwa kaum feminis lebih menekankan pada tuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala bidang. Sementara dalam ajaran Islam bahwa perempuan pada dasarnya memiliki eksistensi yang tak pernah dinomorduakan. Kaum perempuan memiliki harkat dan keluhuran yang diakui oleh Islam. Sehingga perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam hanya terletak pada kedalaman iman dan amal shalih dari masing-masing individu. Sehingga keterlibatan perempuan dalam bidang politik haruslah menghadirkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, tanpa harus menuntut kesetaraan posisi dan peran seperti yang didengungkan oleh kalangan feminis. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap perempuan Islam dalam keterlibatannya di ranah politik

(Takariawan, 2002:20).

B. Kerangka Pikir

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa dengan terbukanya kran demokrasi yang luas memungkinkan untuk setiap elemen bangsa berperan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan terutama dalam bidang politik, sejatinya seluruh elemen terlibat termasuk dari kalangan perempuan. Dengan terlibatnya perempuan dalam pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai perbaikan. Peran dari kalangan perempuan bukan hanya sebagai pengamat saja, tetapi bagaimana perempuan juga mampu mengambil peran dalam mempengaruhi kebijakan publik salah satu sistem politik yang mendukung proses pembangunan dalam negara kita adalah Pemilu. Sebagai salah satu instrumen demokrasi, pemilu merupakan sarana untuk mengukur kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat. Sehingga keterlibatan setiap elemen masyarakat menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Partisipasi politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga di mungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini di dasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut. Keikutsertaan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari adanya motif yang mendorong politik perempuan dalam berpartisipasi. Motif inilah yang kemudian menentukan bentuk partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*paradigma naturalistik*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analisis Deskriptif*, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten pangkep . Pengambilan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kabupaten pangkep merupakan barometer dalam partisipasi politik perempuan masyarakat, mengingat kabupaten pangkep merupakan daerah yang masyarakatnya dominan dalam partisipasi politik perempuan sangat antusias dan tidaklah wajar bila kemudian kemajuan kabupaten pangkep berbanding terbalik dengan tingkat dan kualitas partisipasi politik masyarakatnya, terlebih lagi partisipasi politik perempuan. Secara karakteristik masyarakat Kabupaten pangkep adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan-perbedaan dalam karakteristik masyarakat setidaknya memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat terutama kaum perempuan. Artinya, politik perempuan di Kabupaten pangkep bukanlah suatu entitas yang memiliki kesamaan-kesamaan pilihan politik dalam bentuk, sarana, metode, dan tujuannya. Perbedaan-perbedaan pilihan bentuk partisipasi politik tidak terlepas dari adanya motif-motif yang menyertainya. Motif-motif inilah kemudian yang mendorong politik perempuan di kabupaten pangkep untuk melakukan partisipasi politik.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perempuan yang terlibat langsung dalam

pemilukada seperti penyelenggara KPU dan DPRD jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang informan. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Artinya informan ini ditentukan dengan sengaja, dimana hanya penyelenggara KPU, dan DPRD yang benar benar memahami dan dapat memberikan informasi dalam pemilukada. Informan dalam penelitian ini adalah data primer. Selain itu akan dipergunakan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang ada sebelumnya.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data perempuan yang berkerja sebagai penyelenggara KPU dan DPRD. yang berpartisipasi langsung dalam pemilukada.

2. Data Sekunder

Selain sumber data primer juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Penulis memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip dari kantor KPU dan BPS di kabupaten Pangkep.

D. Fokus Penelitian

1. Bentuk partisipasi perempuan

- a. Pemberian suara artinya adalah alat untuk mengespresikan dan memberi pilihan partai atau calon dalam pemilihan.
- b. Menjadi tim sukses adalah orang yang sangat berpengaruh dalam usaha kemenangan calon pasangan, pemilukada diutamakan orang yang sudah memiliki kemampuan secara menejerial serta loyalitas dan tidak dapat diragukan serta mempunyai visi dan misi jangka panjang. menurut harmen batubara 2017
- c. Menjadi anggota partai politik adalah menurut trubus rahardiansyah f sebuah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan juga stabil yang mempersatukan serta dimotifasi oleh idiologi tertentu dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu yang demokratis.

2. Faktor yang melatar belakangi partisipasi perempuan
 - a. Dukungan keluarga adalah tindakan atau tingka laku serta informasi yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam mencapai tujuanya atau mengatasi masalah seseorang pada situasi tertentu, bahwa dirinya dihargai dan dihormati yang merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban(ritandiono,2008)
 - b. Dukungan masyarakat adalah tersedianya hubungan yang sifatnya menolong serta memiliki nilai khusus bagi seseorang yang menerimanya.(cahyadi:2012)
 - c. Dukungan dari partai politik adalah RH SOLTAU, sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir dimana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan juga lakukan kebijakan organisasi.

E. Instrument penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen, yakni:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif dalam penelitian kualitatif.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

3. dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data- data tertulis yang ada di lembaga yang terkait dengan partisipasi politik perempuan seperti KPU dan BPS kabupaten pangkep.

F. Jenis dan Sumber Data

Informasi dan data tentang partisipasi politik perempuan di Kabupaten pangkep ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan subyek penelitian di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2000: 90). Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh partai politik dan penyelenggara pemilu yang terkait dalam partisipasi politik perempuan di kabupaten pangkep. Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah merepresentasikan karakteristik dari bentuk partisipasi politik perempuan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif yang tidak mendasarkan pada kuantitas informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis partisipasi politik perempuan. Kerangka berpikir yang digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen, yakni:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif dalam penelitian kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur, yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman akan tetapi unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran masih dicapai secara maksimal untuk memperoleh data secara mendalam. Dengan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut bertujuan untuk memperoleh keterangan rinci dan mendalam mengenai pandangan informan dan memperoleh informasi

mengenai suatu peristiwa, situasi, dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menemui langsung informan dan subyek penelitian sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan. Wawancara ditujukan pada perempuan yang ikut memberikan suara dalam pemilu 2013 yang meliputi bentuk dan motif mereka. Adapun pedoman wawancara yang digunakan dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian photo. (Rachman,1999: 77). Pengamatan yang akan peneliti laksanakan adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi terjadinya peristiwa yakni kabupaten pangkep yang meliputi gambaran lokasi, letak geografis, dan gambaran pemilu tahun 2013.

3. dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data- data tertulis yang ada di lembaga yang terkait dengan partisipasi politik perempuan seperti KPU dan BPS kabupaten pangkep. pengumpulan data tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang berupa laporan perolehan suara pemilu tahun 2013, jumlah kontestan pemilu, dan data statistik kependudukan

H. Teknik Analisis Data

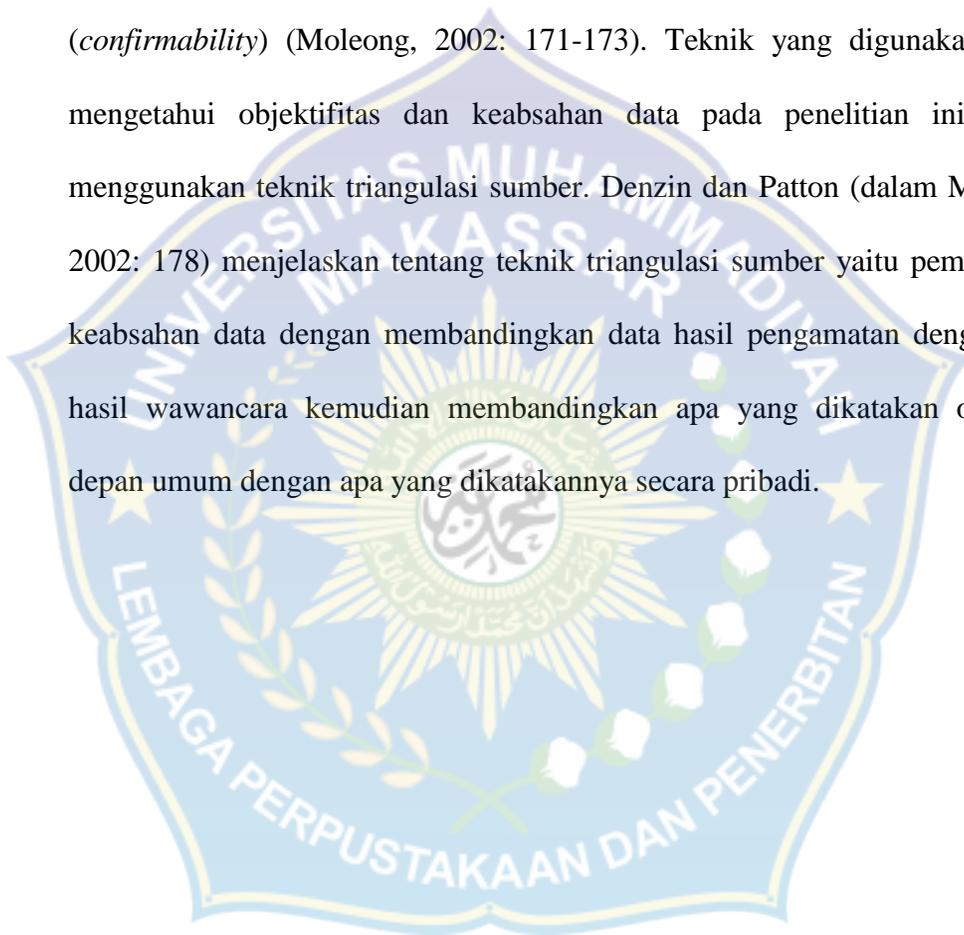
Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian.

Analisis data menurut Moleong (2002: 103) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap sebagaimana versi Miles dan Huberman (1992:15) yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan dengan menggunakan berbagai metode.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data akan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses reduksi data yang akan
- c.
- d. dilakukan peneliti berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang dan mana yang merupakan kebutuhan analisis. Menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara demikian harapannya kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- e. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.
- f. Penarikan Simpulan/Verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari analisa data. Dalam penarikan simpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Keempat tahapan diatas merupakan satu kesatuan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Hal ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut: Pengumpulan Data, Pengumpulan Data Penyajian Data, Penarikan Simpulan dan Reduksi Data Verifikasi Analisis data versi Miles dan Huberman (1992: 20).

I. Keabsahan Data

Objektifitas dalam penelitian ini atas dasar paradigma mikro (naturalistik) yaitu bahwa objektif yang dimaksud adalah realitas sebagaimana dipahami dan dihayati oleh subjek, bukan sembarang subjektif melainkan objektif menurut para subjek (*objectivied subjectivites*). Sedangkan untuk mendapatkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2002: 171-173). Teknik yang digunakan untuk mengetahui objektifitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber. Denzin dan Patton (dalam Moleong, 2002: 178) menjelaskan tentang teknik triangulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.



BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Kantor KPU dan DPRD Kabupaten Pangkep

1. kantor KPU

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pangkepene dan Kepulauan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan Tahun 2005-2019.

2. Kantor DPRD di Kabupaten Pangkep

Berdasarkan rekapitulasi suara di 13 kecamatan di Pangkep, yang digelar sejak kemarin hingga tadi. Pasangan yang diusung partai Golkar, PKB, Republikan, Kedaulatan, PDI, PPDI, PBB, PSI, dan Gerindra ini memperoleh 60.877 suara. Posisi kedua disusul M taufik Fachruddin–Nurul Jaman 52.136 suara, Baso Amirullah–A Kemal Burhanuddin 43.224 suara, Kamrussamad–Rizaldi Parumpa 11.125 suara, Fadhillah Mallarangan– Abdul Muis 3.152 suara, dan pasangan A Mansyur–M Basri Hasan memperoleh 877 suara. Ketua Kelompok Kerja KPUD Pangkep, burhanuddin mengatakan dari 220.315 daftar pemilih tetap, hanya sekitar 80 persen warga yang menggunakan hak pilihnya. Menurutnya jumlah ini sudah cukup tinggi. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Daerah (KPUD) Pangkep, Mutahhar mengatakan seluruh tahapan Pilkada Pangkep berjalan lancar. Menurutnya, ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan seluruh pihak yang terkait termasuk pasangan calon yang legowo menerima hasil pilkada.

3. Kondisi Geografis dan Iklim kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada 11.00' Bujur Timur dan 040. 40' – 080. 00' Lintang Selatan.

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanas) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu :

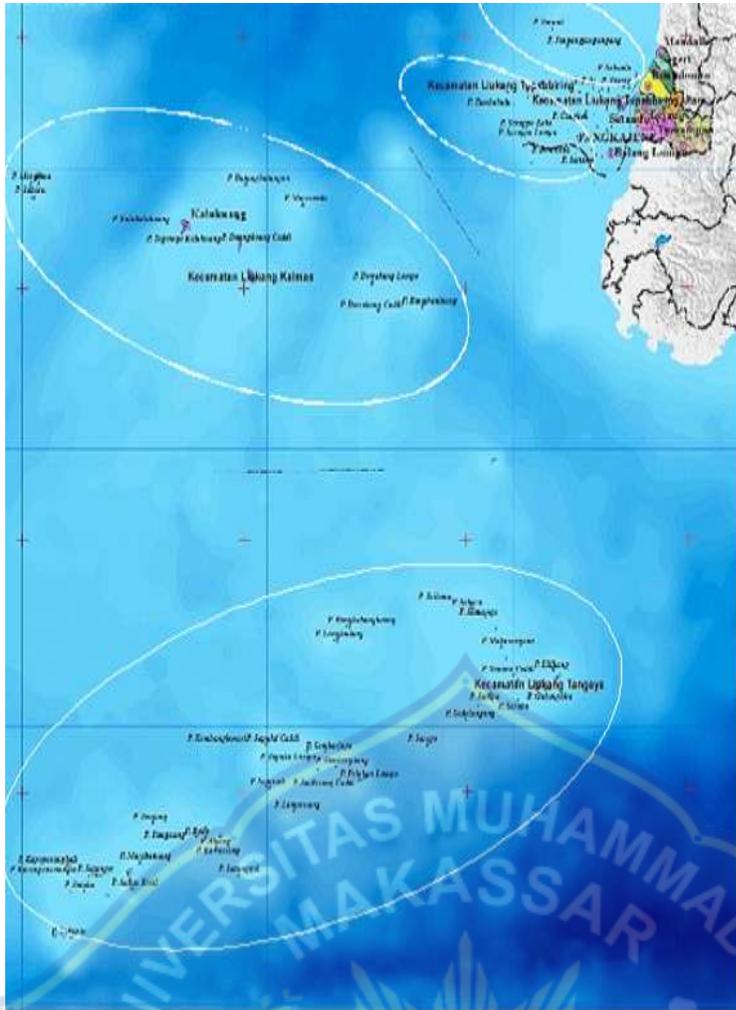


Gambar 4.1

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan dengan luas wilayah daratan 898,29 Km² , dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.

Wilayah Kepulauan

Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas wilayah laut 11.464,44 Km², dengan pulau sebanyak 115 pulau, 73 pulau berpenghuni dan 42 yang tidak berpenghuni, merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Gambar 4.2

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai pada Tahun 2017, wilayah administratifnya mencakup 13 Kecamatan, 4 Kecamatan Kepulauan, yakni Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, 9 Kecamatan Daratan yakni; Pangkajene, Minasatene, Balocci, Tondong Tallasa, Bongoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 103. Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada Tabel 4.1:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel./Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			Ha.	(%)	Ha.	(%)
1	Liukang Tangaya	9	12.000	10,79	260.70	5.10
2	Liukang Kalmas	7	9.150	8,23	226.32	4.43
3	Liukang Tupabbiring	9	5.444	4,89	251.04	4.92

4	Liukang Tupabbiring Utara	7	8.556	7,69	214.86	4.21
5	Pangkajene	9	4.739	4,26	561.64	11.00
6	Minasatene	8	7.648	6,88	523.56	10.25
7	Balocci	5	14.308	12,90	262.08	5.13
8	Tondong Tallasa	6	11.120	10,00	169.14	3.31
9	Bungoro	8	9.012	8,10	653.88	12.80
10	Labangkang	13	9.846	8,85	847.92	16.60
11	Ma'rang	10	7.522	6,76	588.18	11.52
12	Segeri	6	7.828	7,04	298.26	5.84
13	Mandalle	6	4.016	3,61	249.72	4.89
	J U M L A H	103	111.229	100	5.107.20	100

IKLIM

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kondisi tipe iklim ini menjadi iklim tipe C1 dengan bulan kering < 2 bulan, iklim tipe C2 dengan bulan kering 2-3 bulan, dan iklim dengan bulan kering 3 bulan. Keduanya memiliki bulan basah antara 5-6 bulan secara berturut-turut dalam satu tahun dengan curah hujan rata-rata 2.500-3.000 mm/tahun. Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah.

Temperatur udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kisaran 21” sampai dengan 31” atau rata-rata 26,4”C. Keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Tempat pendeteksiaan hujan berada di stasiun tabo-tabo, leang lonrong dan stasiun segeri. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi mencapai 640/131 hari hujan berdasarkan catatan dari stasiun tabo-tabo dengan kelembapan yang tidak merata.

4. Topografi, Geologi dan Hidrologi

Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya) dan asteroid. Topografi umumnya

menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief adalah bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (landform), sedang topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (landform) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 Ha membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari persawahan, tambak, rawa-rawa, dan empang. Daerah pegunungan berada pada ketinggian 100 – 1000 m di atas permukaan air laut, yang terletak di sebelah timur dan merupakan wilayah yang banyak mengandung batu cadas, batu bara, serta berbagai jenis batu marmer. Temperatur udara berada pada kisaran 21°C - 31°C dengan rata-rata 26,4° C. Kondisi angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang, dengan curah hujan rata-rata mencapai 666/153 hari hujan.

Kemudian berdasarkan peta jenis tanah menunjukkan bahwa secara geologi Berdasarkan peta geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka terdapat 4 (empat) bagian besar dari kondisi struktur geologi yang menyusun tanah dan batuan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dan informasi tentang kondisi geologi sangat penting artinya dalam memanfaatkan lahan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya. Adapun struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

- a. Endapan Permukaan : jenis endapan permukaan ini berupa jenis tanah alluvial, daerah rawa, endapan pantai, delta dan daerah aliran sungai.
- b. Batuan Sedimen : jenis batuan sedimen meliputi batuan berpasir, batuan kerikil, kerakal konglomerat, batuan berlempung, batuan lanau, napal, tuvaran, lava dan breksi.
- c. Batuan sedimen bercampur batuan gunung api : jenis struktur batuan ini terbentuk dari formasi camba : terdiri dari batuan sedimen laut

berselingan dengan batuan gunung api, breksi, lava, tufa, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batuan napalm alihan.

- d. Batuan Terobosan : jenis struktur batuan ini terdiri dari terobosan bersifat basa terutama batuan terobosan yang bersifat asam dan menengah, meliputi granodiamit diorite, tralit, dan batuan baku terobosan bersifat ultra basa terutama pridotil.

Secara garis besar sebaran dari jenis struktur geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari :

1. Jenis endapan permukaan tersebar secara tidak merata pada sepanjang bagian pesisir.
2. Jenis batuan sedimen tersebar secara tidak merata pada bagian dataran rendah.
3. Jenis batuan sedimen berselingan gunung api dan batuan terobosan sebagian besar tersebar di dataran tinggi terutama di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa dan Ma'rang.

Berdasarkan struktur geologi, maka terdapat berbagai jenis bahan tambang, seperti basal, batu gamping, batu sabak, diorite, tras, kaolin, feldspar, lempung, marmer, batu bara dan lain-lain. Bahan galian ini tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kondisi geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal sesar yaitu pada bagian daratan terdiri atas : foliasi perlipatan, sesar dan kekar dengan arah umum foliasi arah barat laut tenggara miring ke arah timur laut antara 20o - 60o, sumbu perlipatan berarah utara selatan dan barat laut tenggara berupa antiklin tidak simetris, dan sesar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas sesar normal dan sesar geser.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan

Partisipasi perempuan terhadap proses pengambilan keputusan selama ini belum bisa dijadikan sebagai landasan bahwa kepentingan perempuan dalam setiap rana sudah di libatkan. Didalam landasan hukum kesetaraan dan keadilan gender kabupaten Pangkep dapat dilihat dalam Undang-undang dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 dan 2, dan Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1, Inilah yang menjadi landasan formal yang kokoh bagi tercantumnya tentang perempuan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), tapi kenyataannya pasal-pasal tersebut tidak menjamin keterlaksanaan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut hasil wawancara di kota Makassar yaitu bahwa:

Adapun tanggapan SU tentang kehadiran perempuan terlibat di panggung demokrasi yaitu sebagai berikut:

Sangatlah positif dimana menjadi penyelambung dalam panggung demokrasi yang saat ini didominasi laki-laki dengan kehadiran perempuan dalam panggung demokrasi setidaknya memperlihatkan bahwa perempuan punya tempat tersendiri.

Adapun tanggapan HN tentang kehadiran perempuan terlibat di panggung demokrasi yaitu sebagai berikut:

Ada sekitar 30% kouta pencalonan perempuan untuk memenuhi kabupaten kaderisasi partai politik untuk meningkatkan kapasitas dipanggung demokrasi belum bias, hanya untuk ikut mempengaruhi kebijakan karna untuk saat ini masih jarang perempuan menjadi partai politik.

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kebijakan yang diskrimatif walaupun dipandang genre diskriminasi yang positif. Dimana pandangan masyarakat saat ini dalam dunia politik yang menjadikan dasar bahwa perempuan diberikan kesempatan dengan kouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan.

Kemudian persepsi/tanggapan yang dikemukakan oleh pengguna lainnya tentang partisipasi politik terhadap perempuan ini yaitu bahwa : HI

Perempuan diberikan peluang yang luas untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dimana kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik. Jadi yang tadi saya katakan kita melihat dari apa visi dan misinya kedepan apakah nantinya berpengaruh besar terhadap politik.

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kebijakan yang diskrimatif walaupun dipandang genre diskriminasi yang positif. Dimana pandangan masyarakat saat ini dalam dunia politik yang menjadikan dasar bahwa perempuan diberikan kesempatan dengan kouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan. Adapun tanggapan lain yang diungkapkan salah seorang informan yaitu FI, adapu pendapatnya tentang partisipasi politik terhadap perempuan sebagai berikut:

KPU memberikan ruang atau kesempatan pada perempuan tanpa ada deskriminasi berdasarkan UUD 1945 peraturan perundang – undangan serta instrumen hukum internasional menjamin hak politik perempuan menerbitkan kebijakan kurangnya 30 persen perempuan dalam terdaftar calon anggota legislative 2003.

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kebijakan yang diskrimatif walaupun dipandang genre diskriminasi yang positif. Dimana pandangan masyarakat saat ini dalam dunia politik yang menjadikan

dasar bahwa perempuan diberikan kesempatan dengan kouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan..

Kemudian informan terakhir meengemukakan tentang partisipasi politik terhadap perempuan sebagai yaitu SS mengemukakan bahwa:

Belum adanya sosok figur perempuan yang mampu bertarung dipilkada salah satu faktor adalah kurangnya kepercayaan diri.

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kebijakan yang diskrimatif walaupun dipandang genre diskriminasi yang positif. Dimana pandangan masyarakat saat ini dalam dunia politik yang menjadikan dasar bahwa perempuan diberikan kesempatan dengan kouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan.

2. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan

Segala sesuatu baik yang baru muncul maupun yang telah lama sudah pasti memiliki dampak, begitupun dengan hadirnya perempuan yang berpartisipasi dalam politik mampu mendorong dan mengdobrak semangat perempuan-perempuan. Berikut hasil wawancara yaitu, mengatakan bahwa:HI

Sangatlah dibutuhkan karena biasanya pemikiran-pemikiran perempuan tidak dimiliki laki-laki (tidak terpikirkan) dalam pengambilan kebijakan.

Kemudian pendapat lain dari yaitu SS bahwa:

Keterwakilan suara perempuan di DPRD memberikan angin segar bagi kaum hawa terkhusus di kab. Pangkep mampu menyerahkan dan memperjuangkan aspirasi kaum hawa.

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kebijakan yang diskrimatif walaupun dipandang genre diskriminasi yang positif. Dimana pandangan masyarakat saat ini dalam dunia politik yang menjadikan dasar bahwa perempuan diberikan kesempatan dengan kouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan. Seperti yang dikatakan yaitu HN bahwa:

Sangatlah penting karna didalam berpolitik bukan hanya laki-laki yang bias bergelut tetapi perempuan juga mampu berada dalam area demokrasi.

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kebijakan yang diskrimatif walaupun dipandang genre diskriminasi yang positif. Dimana pandangan masyarakat saat ini dalam dunia politik yang menjadikan dasar bahwa perempuan diberikan kesempatan dengan kouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan. Kemudian tanggapan serupa yang diberikan oleh seorang ibu muda yaitu NN bahwa: SI

Perempuan sangat dibutuhkan dalam partisipasinya oleh karna sebagian besar penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga sangat dibutuhkan suara perempuan dalam pengambilan kebijakan.

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keterlibatan perempuan dipanggung pesta demokrasi memberikan dampak pada positif bagi kalangan perempuan karna mampu menyatukan suaranya oleh kaum minoritas agar keterwakilan perempuan sebagai wujud atau harapan untuk kesejahteraan perempuan dari kesenjangan sosial.

B. Pembahasan

Siang dalam nomenklatur Portugis disebut Sciom atau Ciom. Nama “Siang” berasal dari kata “kasiwiang”, yang berarti persembahan kepada raja (homage rendu a' un souverain) . (Pelras, 1977 : 253). Bekas pusat wilayah Kerajaan Siang, SengkaE – sekarang ini terletak di Desa Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Pangkep – telah dikunjungi oleh kapal-kapal Portugis antara tahun 1542 dan 1548. (M Ali Fadhillah, 2000). Pelras mengemukakan bahwa selama

masa pengaruh Luwu di semenanjung timur Sulawesi Selatan, kemungkinan dari Abad X hingga Abad XVI, terdapat kerajaan besar lain di semenanjung barat, dikenal dengan nama Siang, yang pertama kali muncul pada sumber Erofah dalam peta Portugis bertarikh 1540. Menurut catatan Portugis dari Abad XVI, Tallo pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa dan Gowa sendiri mengakui Kerajaan Siang sebagai kerajaan yang “lebih besar” dan lebih kuat dari mereka. (Andaya, 2004). Sumber Portugis menyebutkan Siang pernah diperintah seorang raja bernama Raja Kodingareng (Gadinaro, menurut dialek orang Portugis), sezaman dengan Don Alfonso, Raja Portugal I dan Paus Pascal II. (A Zainal Abidin Farid : 1986). Pada tahun 1540 atau jauh sebelumnya, pelabuhan Siang sudah banyak dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru kepulauan Nusantara, bahkan dari Erofah. Pengamat Portugis, Manuel Pinto, memperkirakan pada tahun 1545 Siang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Penguasanya sangat yakin terhadap sumber – sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya sehingga menawarkan untuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan Kerajaan Malaka (Pelras 1973 : 53). Menurut catatan Portugis dari Abad XVI, Gowa dan Tallo pernah jadi vasal Siang. Tradisi lisan setempat mempertahankan pandangan ini. Penemuan arkeologi berharga di bekas wilayah Siang kelihatannya lebih memperkuat asumsi bahwa kerajaan ini adalah bisa jadi adalah kerajaan besar di pantai barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Gowa dan Tallo (Pelras, 1973 : 54). Pada Tahun 1542, Antonio de Paiva, menyinggahi pusat wilayah Kerajaan Siang dan tinggal di Siang untuk beberapa waktu, sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara menuju Sulawesi Tengah untuk mencari Kayu Cendana (sandal wood). Ketika kembali tahun 1544, de Paiva singgah di tiga tempat, yaitu : Suppa, Siang dan Gowa (Pelras, 1973 : 41). Catatan de Paiva menyebutkan bahwa Gowa adalah sebuah kota yang besar “yang dulunya merupakan kerajaan bawahan Siang, namun tidak lagi begitu”. (Pelras, 1973 : 47). Laporan de Paiva ini menunjukkan kemungkinan Siang berada pada puncak kejayaan dan kemasyhuran sekitar Abad XIV – akhir XVI. Pelras dari penelitian awalnya terhadap sumber Erofah dan sumber lokal, menyatakan Siang, sebagai pusat perdagangan penting dan mungkin juga secara politik antara Abad XIV - XVI. Pengaruhnya menyebar hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal Kerajaan Lima'e Ajattappareng hingga ke selatan perbatasan kerajaan Makassar, yakni Gowa-Tallo. Pada pertengahan Abad XVI, Kerajaan Siang menurun pengaruhnya oleh naiknya kekuatan politik baru di pantai barat dengan pelabuhannya yang lebih strategis, Pelabuhan Somba Opu. Kerajaan itu tak lain Kerajaan Gowa, yang mulai gencar melancarkan ekspansi pada masa pemerintahan Karaeng Tumapakrisika Kallonna. Persekutuan Kerajaan Gowa dan Tallo akhirnya membawa petaka bagi Siang, sampai akhirnya mati dan terlupakan, di penghujung Abad XVI. (Pelras 1977 : 252-5). Abdul Razak Dg Mile menyatakan bahwa Raja Siang yang pertama disebut Tumanurunge Ri Bontang (A. Razak Dg Mile, PR : 1975). Sementara M Taliu menyebut periode pertama Kerajaan Siang, digagas seorang tokoh perempuan, Manurunga ri Siang, bernama Nasauleng bergelar Puteri Kemala Mutu Manikkang. Garis keturunan Tomanurung Ri Siang inilah yang berganti-ganti menjadi raja di Siang (asossorangi ma'gauka) sampai tiba masanya Karaeng Allu memerintah di Siang paska Kerajaan Siang dibawah dominasi Kerajaan Gowa. Sumber tradisi lisan menyebutkan bahwa penggagas dinasti Siang mempunyai lima saudara laki-laki dan perempuan yang masing – masing mendirikan Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, Jawa dan Manila. Dalam tradisi tutur yang berkembang di Pangkajene diyakini bahwa Siang mempunyai tempat istimewa dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Barangkali keterangan Pelras mengonfirmasikan tradisi tersebut, bahwa kendati Siang telah menjadi vasal Gowa pada akhir Abad XVII, adat Siang mengharuskan agar raja – raja dari negeri besar lain yang melintasi teritori Siang memberi hormat pada “Karaeng Siang”. (M Ali Fadhillah, 2000 : 17). Sumber Portugis banyak menunjuk periode-periode awal pertumbuhan situs-situs niaga di pesisir barat, sebagaimana catatan Pelras (1977 : 243) melihat, gelombang kedatangan Portugis ke Siang sepanjang pertengahan pertama dan akhir Abad XVI, mengacu pada masa

dimana Siang sedang menurun dalam perannya sebagai kota niaga dan pusat politik di pesisir barat teritori Makassar. Dugaan itu mempunyai estimasi bahwa Siang mengacu pada apa yang dilukiskan orang dengan istilah Makassar (Macacar). Dari kesejajaran konteks sejarahnya dengan Bantaeng di pesisir selatan, Siang dapat diterangkan pada periode pertama sebagai pelabuhan kurang dikenal, tetapi bukti-bukti arkeologi mendorong kita mengajukan estimasi awal bahwa Siang telah masuk dalam jaringan perdagangan mungkin langsung dengan pelabuhan-pelabuhan sebelah barat kepulauan. Apabila Bantaeng dan Luwu pada masa jatuhnya Majapahit mulai pudar peranannya, sebaliknya Siang, semakin meningkat dengan jatuhnya Kerajaan Malaka berkat gelombang kedatangan pedagang Melayu dari Johor, Pahang dan mungkin dari daratan Asia Tenggara daratan lainnya. Pada periode kedua, sejalan dengan semakin jauhnya garis pantai akibat pengendapan sungai Siang sebagai akses utama memasuki kota itu, dan perpindahan koloni pedagang Melayu ke Gowa di pesisir barat, bahkan sampai Suppa dan Sidenreng di daratan tengah Sulawesi Selatan membuat Siang kehilangan fungsi utamanya sebagai sebuah pelabuhan penting, dibarengi meredupnya pengaruh pusat politiknya. Sampai disini, nasib Siang tidak berbeda dengan Bantaeng, eksis tetapi berada dibawah bayang-bayang kontrol kekuasaan Gowa-Tallo. Pusat kerajaan Siang pada mulanya tumbuh berkat adanya sumber-sumber alam : kelautan, hasil hutan dan mungkin mineral serta padi ladang yang dieksploitasi oleh suatu populasi penduduk Makassar yang telah lama mengenal jaringan perdagangan laut yang luas dengan memanfaatkan muara sungai sebagai akses komunikasi utama. Frekuensi kontaknya dengan komunitas lain membawa perubahan pada pola ekonomi, terutama setelah mengenal teknologi penanaman padi basah (sawah) dan memungkinkan peralihan kegiatan ekonomi sampai ke pedalaman dengan pembukaan hutan-hutan untuk peningkatan produksi padi sebagai komoditas utama. Tome Pires mencatat bahwa satu tahun setelah jatuhnya Malaka (1511), pulau – pulau Macacar (Makassar) merupakan tempat – tempat yang terikat dalam jaringan perdagangan interinsuler. Meskipun Pires menduga bahwa perdagangan Macacar masih kurang penting, tetapi sejak itu, sudah menawarkan rute langsung ke Maluku dengan melalui pesisir – pesisir selatan Kalimantan dan Sulawesi ; sebuah alternatif dari rute tradisional melalui pesisir utara Jawa dan kepulauan Nusa Tenggara. Namun kita harus menunggu sampai pertengahan Abad XVI, untuk mengetahui gambaran Sulawesi Selatan, yaitu sejak perjalanan Antonio de Paiva (1542-1543) dan Manuel Pinto (1545-1548) ke pesisir barat Sulawesi Selatan. Tome Pires menyebut beras sebagai produk utama Macacar. Dan kenyataannya, para pelaut Portugis belakangan telah mempunyai kesan khusus akan kesuburan negeri-negeri Sulawesi Selatan yang terkenal dengan hasil hutan, beras dan makanan lainnya. (Cortesao, 1944 dalam M Ali Fadhillah, 2000). Tonggak sejarah kolonial di Gowa tahun 1667 juga berdampak kuat di Siang. Kekalahan Gowa menghadapi aliansi Belanda-Bone berarti juga kekalahan dinasti Gowa dan kebangkitan kembali dinasti Barasa yang mendukung Arung Palakka. I Johoro Pa'rasanya Tubarania naik sebagai penguasa lokal, I Joro juga digelar Lo'moki Ba'le (penguasa dari seberang), karena ia kembali dari seberang laut (Jawa dan Sumatera) mengikuti misi Arung Palakka ke negeri sebelah barat nusantara. Sejarah kekaraengan Lombassang atau Labakkang mulai dikenal sesudah menurunnya pamor politik ekonomi Siang. Penguasa Labakkang turut membantu Gowa menundukkan Kerajaan Barasa, dinasti pengganti Siang di Pangkajene. Setelah Gowa kalah dari Belanda (1667), Labakkang lepas dari Gowa dan masuk ke dalam kontrol VOC sebelum akhirnya menjadi wilayah administrasi Noorderprovincien , lalu menjadi Noorderdistrichten dalam kendali administrasi Belanda berpusat di Fort Rotterdam (Benteng Jumpandang). Somba Labakkang ketika itu didampingi anggota adat Bujung Tallua , yang berkuasa di unit politik dan teritorial sendiri, yakni di Malise, Mangallekana dan Lombasang, sebelum lebih kompleks lagi dengan bergabungnya penguasa-penguasa kecil lainnya. Sistem politik yang diterapkan Kerajaan Gowa terhadap negeri – negeri taklukannya itu adalah menempatkan Ana' Bate Karaeng , biasa disebut bate-bate'a). kemudian disusul perkawinan keluarga Kerajaan Gowa, pada puncaknya Kerajaan Siang menjadi negeri keluarga kerajaan Gowa yang tidak lagi bisa dipisahkan sampai tahun

1668. Sampai saat ini tidak ada satupun sumber sejarah dapat memastikan umur Kerajaan Siang sampai ditaklukkan Kerajaan Gowa – Tallo. Kerajaan Siang dibawah hegemoni pemerintahan Gowa sekitar 1512 - 1668. Sistem budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat Siang adalah tradisi kultural Gowa, terutama sekali menyangkut hubungan perkawinan antar keluarga raja dan bangsawan Gowa. Penguasa Siang punya hubungan kekeluargaan dengan keluarga kerajaan Luwu, Soppeng, Tanete, dan Bone karena pihak keluarga Kerajaan Gowa juga mengadakan hubungan perkawinan (kawin-mawin) antar keluarga Kerajaan Luwu. Kemudian Luwu kawin-mawin dengan Soppeng, Soppeng kawin-mawin dengan Tanete dan Tanete kawin-mawin dengan Bone. Ringkasnya, keturunan produk sistem kawin - mawin itu telah menjalin hubungan kekerabatan semakin luas. Siang dan beberapa unit teritori politik seperti Barasa (Pangkajene), Lombasang (Labakkang), Segeri, Ma'rang dan Segeri juga mengadakan kawin mawin antar keluarga kerajaan. Barasa berafiliasi Gowa, Bone dan Soppeng. Demikian pula Ma'rang dan Segeri. Sedang Labakkang dengan Gowa, walaupun pada awalnya Labakkang merupakan keturunan raja – raja Luwu, Soppeng dan Tanete. Tradisi kawin-mawin inilah yang menyebabkan masyarakat Pangkep telah menyatukan darah orang Bugis Makassar dalam wujud keturunan, bahasa, tradisi dan adat – istiadat. Silsilah raja – raja Siang setelah tampuk pemerintahan Siang dipegang Karaengta Allu adalah sebagai berikut :(1) Karaeng Allu ; (2) Johor atau Johoro' (Mappasoro) Matinroe' ri Ponrok, yang bersama Arung Palakka ke Pariaman pada abad ke-17 ; (3) Patolla Dg Malliongi ; (4) Pasempa Dg Paraga ; (5) Mangaweang Dg Sisurung ; (6) Pacandak Dg Sirua (Karaeng Bonto – Bonto) ; (7) Palambe Dg Pabali (Karaeng Tallanga) , sezaman dengan datangnya Belanda di Pangkajene ; (8) Karaeng Kaluarrang dari Labakkang ; (9) Ince Wangkang dari Malaka ; (10) Solle Dg Malleja ; (11) Andi Pappé Dg Massikki, berasal dari Soppeng ; (12) Andi Papa Dg Masalle ; (13) Andi Jayalangkara Dg Sitaba ; (14) Andi Mauraga Dg Malliungang ; (15) Andi Burhanuddin ; (16) Andi Muri Dg Lulu. Setiap ada upacara perayaan seperti pengangkatan raja baru, pergantian raja atau upacara kebesaran lainnya yang berhubungan dengan raja, maka diwajibkan hadir Anrong Appaka ri Siang, yaitu : (1) Daeng ri Sengkaya ; (2) Lo'moka ri Kajuara ; (3) Gallaranga ri Lesang ; (4) Gallaranga ri Baru-baru. Setelah empat orang bate-bate'a ini hadir, barulah pelantikan atau acara 'Kalompoanga ri Siang' dapat dianggap sah. Selain keempat bate-bate'a ini juga diharapkan hadir Oppoka ri Pacce'lang. Secara sederhana, silsilah Raja – raja Siang saat dibawah dominasi Gowa (A.Razak Dg Mile, PR : 1957) sebagai berikut : (a) Raja – raja dari keturunan 'Tumanurunga ri Bontang' diperistri oleh yang bergelar 'Si Tujuh Lengan'. Tidak diketahui berapa generasi ! (b) Keturunan Karaengta Allu (Setelah Siang ditaklukkan oleh kerajaan Gowa), juga tidak diketahui berapa generasi. (c) Keturunan I Johor atau Johoro' (Mappasoro) , sahabat Arung Palakka, dimana Arung Palakka menjadi Raja Bone sejak tahun 1672. (d) Raja – raja yang berasal dari Kerajaan Siang sendiri, mulai dari keturunan Pattola Dg Malliongi (di masa kompeni Belanda). Hasil penelitian arkeologi Balai Arkeologi Makassar dan UNHAS menyebutkan bahwa ibukota Kerajaan Siang terletak pada sebuah lokasi yang dikelilingi oleh benteng kota (batanna kotayya) . Bentengnya mengelilingi lahan yang sekarang menjadi kompleks kuburan yang dikeramatkan. Alur benteng Siang (batanna kotayya)diperkirakan berbentuk huruf U, kedua ujungnya bermuara di Sungai Siang yang telah mati. (Fadhillah dan Irfan Mahmud, 2000 : 27). Indikasi arkeologis pada lokasi situs berupa gejala perubahan rupa bumi dan proses pengendapan telah menjauhkan pusat Kerajaan Siang dari pesisir. Kemunduran Siang, yang diperkirakan terjadi pada akhir abad XVI. Kemenangan Gowa-Labakkang atas Barasa memberikan hak kerabat raja Gowa menduduki tahta Barasa, gelar sesudah matinya : Karaeng Matinroe ri Kammasi yang diganti oleh Karaeng Allu. Yang terakhir ini mengalihkan pusat politiknya kembali ke Siang, dan seolah menghidupkan kembali kebesaran Siang dengan memakai gelar Karaeng Siang, juga membentuk dewan adat Anrong Appaka (empat bangsawan kepala) : Kare Kajuara , Kare Sengkae, Kare Lesang dan Kare Baru-baru . Masing-masing kare mengepalari pusat kecil kekuasaan dan membentuk konfederasi dibawah otoritas Siang baru (periode Islam). Karaeng Allu juga yang

menempatkan Kalompoang atau Arajang Siang dibawah pemeliharaan Oppoka ri Paccelang. Temuan – temuan fragmen keramik hasil ekskavasi situs Siang di SengkaE, Bori Appaka, Bungoro berupa Piring dan Mangkuk Ching BW, Cepuk Cing, Mangkuk Swatow BW, Mangkuk Wangli BW, Mangkuk Ming BW, Piring Ming Putih, Piring Swatow, yang berasal dari Abad XVII-XVIII. Juga ada fragmen keramik dari Abad XVI seperti Vas Swankalok, Mangkuk Ming BW, Piring Ming BW, Piring dan Tempayan Vietnam. Jumlah keseluruhan temuan sebanyak 38 fragmen keramik. Keramik Asing dinasti Ching memberi kronologi relatif lapisan budaya Siang menyampaikan periode relatif berlangsungnya lapisan budaya negeri Siang, yang sekurang-kurang berasal dari Abad XVII-XVIII (M Ali Fadhillah dkk, 2000 : 72)

Revolusi Fisik

Di Sulawesi Selatan, Muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Gerakan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah-daerah seperti Gowa, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Bulukumba, Jeneponto, serta daerah – daerah lainnya. Pangkep sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut ambil bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno - Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Pangkep ditetapkan sebagai bagian dari wilayah RI sejak awal September 1945, yang diumumkan oleh Andi Burhanuddin. Semua pemerintah kerajaan lokal, yang juga sebagai kepala pemerintahan onderdistrict , memberi dukungan. Dukungan yang agak kuat berasal dari Andi Mandacingi (Karaeng Mandalle), Andi Page (Karaeng Segeri), dan Andi Makin (Karaeng Ma'rang). Bahkan mereka bertiga menghadap langsung Gubernur Sulawesi, Dr GSSJ Ratulangi di Makassar. Dukungan lainnya berasal dari Bungoro, Balocci, Labakkang dan Pulau.

Awal September 1945, Andi Burhanuddin membentuk Barisan Pemuda Merah Putih (disingkat Barisan PMP). Badan perjuangan yang mula terbentuk itu dipimpin oleh Zainuddin Condeng dan Abdul Latif dengan para anggotanya berasal dari bekas Heiho, Boei Taisin Tai dan Seinendan. Ada pula yang pernah dilatih oleh Pemerintah Belanda menjelang kedatangan Jepang, yakni Barisan Staatswatch . Pemuda militan ditampung dalam Barisan PMP, sehingga kekuatan perjuangan bisa terkoordinasi. Konsolidasi Barisan PMP, kemudian dipusatkan di Mandalle. Di tempat itu, Andi Mandacingi berusaha memperkuat badan perjuangan, dengan pembinaan pemuda-pemuda. Ia dibantu oleh semua pimpinan PMP, Zainuddin Condeng dkk. Para kepala kampung dalam Distrik Mandalle diberi penjelasan tentang kemerdekaan dan usaha mempertahankannya. Pemuka masyarakat berpengaruh, menjadi sasaran utama, agar tidak menjadi sasaran bujukan NICA. Akhir September 1945, NICA memulai aksinya, antara lain membujuk tokoh masyarakat dan bangsawan lokal. Demikian, maka Andi Mandacingi menemui Mamma Daeng Mangimbangi, sepupunya sendiri. Biasanya NICA senang mengadu domba diantara bangsawan lokal yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Melalui ucapan dalam bahasa Bugis, Mamma memberikan tanda dukungan, sebagai berikut :“paonanni lopi utonang, narekko titti-i, titti'na utonangi, narekko lumpangi, lumpanna utonangi”. Pada 20 September 1945, kepala kampung, imam, pemuka masyarakat, dan pemuda pejuang mengucapkan ikrar kesetiaan, bertempat di kediaman raja (Saoraja) Mandalle. Peresmian Barisan Pemuda Merah Putih oleh Andi Mandacingi sekaligus menyatakan bahwa wilayah adatgemenschaap Mandalle adalah bagian dari RI. Malamnya, susunan Barisan PMP disahkan dan dipilih sebagai Pimpinan Umum, Zainuddin Condeng dengan Kepala Pasukan Abdul Lathief dan Mamma Dg Mangimbangi, Sementara Kepala Kelompok M Jamil, M Tahir Dg Liong dan Lakaterru Baco Pararang. Kepala Pemerintahan Mandalle merupakan Penguasa Hukum dan Pertahanan/Keamanan Wilayah. Sejak itu, Mandalle menjadi pusat kekuatan pejuang kemerdekaan di daerah Pangkep. Wilayah gerak meliputi daerah Segeri dan Ma'rang. Di Segeri, dibentuk Barisan PMP, cabang Mandalle. Pada 5 Oktober 1946, terpilih sebagai Kepala Pasukan adalah Hadele dengan Kepala Kelompok yaitu Supu Dg Pasanrang, Sudding, La Magga, dan Beddu Lai. Setiap gerakan termasuk pembinaan kesatuan, dalam hal yang memungkinkan selalu terjalin kerjasama dengan pimpinan di Mandalle.

Koordinasi dengan pemuda Ma'rang menghasilkan susunan pengurus Barisan PMP dengan Kepala Pasukan Abdul Lathief dan para Kepala kelompok Parellu, Baso Dg Magading, Patahuddin, M Badwi. Wilayah gerak Barisan PMP Ma'rang, meliputi pula wilayah Kota Pangkajene yang dipimpin oleh M Badwi, karena pada saat itu NICA sudah menguasai Pangkajene dan sudah menanamkan pengaruhnya. Perkembangan organisasi perjuangan, menyebabkan diadakan susunan pengurus khusus Mandalle dengan Kepala Pasukan Mamma Daeng Mangimbangi dengan Para Kepala Kelompok : M Tahir Dg Liong, La Katerru Baco Pararang, Sabe Sanre, dan La Upe Dg Ngalle. Pembentukan kepala pasukan di tiga tempat itu, lebih memperkokoh kekuatan pejuang. Yang menjadi hambatan, sisa masalah senjata. Orang-orang Jepang sejak bulan September sudah berkumpul di Kota Makassar. Maka, untuk dipergunakan dalam latihan, pemuda memakai tombak dan bambu runcing. Sementara Andi Mandacingi dan Zainuddin Condeng mengusahakan pengadaan senjata. Seperti di tempat lain, yang menjadi pelatih, mereka yang berasal dari Heiho, Boei Teisin Tai, dibantu Seinendan. Juga dijalin kerjasama dengan laskar GPT (Gerakan Pemuda Tanete) pimpinan Andi Abdul Muis Datu Lolo. Usaha pengadaan senjata dilakukan melalui berbagai cara. Ke Kalimantan dibawa beras untuk ditukarkan dengan senjata. Dari pulau seberang Selat Makassar itu, diperoleh berita ada orang-orang yang menyimpan senjata. Tentara sekutu yang ingin kembali, bersedia menyerahkan senjatanya, dengan tukaran makanan, terutama ayam. Juga orang Jepang yang melepaskan diri dari kesatuannya, mau menukar senjatanya dengan beras. Ketika itu, terkenal istilah "sikokang", artinya tukar menukar barang. M Amin Sajo ditugaskan pula mencari senjata di Makassar. Ia kebetulan mengikuti kursus kader PNI pimpinan Mr Tajuddin Noer, pada November 1945. Ke Kalimantan ditugaskan La Ribi dan kawan – kawan yang berhasil membawa kembali satu peti berisi 24 biji granat tangan dan 40 pasang pakaian dinas militer (seragam). Sambil mencari senjata, Zainuddin Condeng bersama Ishak Lubis, atas perintah Andi Mandacingi, berangkat ke Makassar. Tugas lainnya ialah menemui para pemimpin pemuda. Akan tetapi, para pemuda di Makassar pun kekurangan senjata. Mereka gagal memperoleh senjata dari Jepang, hanya karena terdapat perbedaan paham antara pemuda militan dengan kelompok Dr Ratulangi yang menekankan perjuangan diplomasi. Di Balocci, wilayah pinggiran gunung batu sekitar Tonasa, dibentuk pula PPNI pada November 1945, dengan pimpinan H Abdul Hamid, Muhammad Hasyim, Abdul Muthalib, Ballacco Dg Parumpa dan Abdul Gani, bermarkas di Matojeng, (Sarita Pawiloy, 1987 : 158 – 163). Konsolidasi markas dipusatkan di Mandalle, pemukiman penduduk di sekitar bukit sebelah timur poros jalan raya utama. Laskar pejuang pada umumnya hanya memegang senjata tajam dan beberapa buah granat tangan. Dapat dibayangkan sulitnya perlawanan terhadap musuh yang bersenjata lengkap. Keadaan itu berlangsung hingga Juli 1946. Di Pangkep, wadah kelaskaran cukup rapi, dan mempunyai cukup banyak anggota. Wadah yang terakhir dibentuk ialah KRIS Muda (28 Juli 1946), yang bermarkas di Coppotompong. Pimpinan dipegang oleh M Dahlan dan Zainuddin Condeng. Dalam struktur kesatuan militer, kekuatan KRIS Muda ialah satu batalion, namun hanya tenaga manusia dengan persenjataan yang terlalu kurang. Selain perlawanan bentuk sabotase, penerangan tentang kemerdekaan dan pemasangan pamflet ; adanya laskar membantu perembesan operasi laskar yang lebih kuat di daerah Pangkep. Pada September 1946, laskar Harimau Indonesia (HI) datang ke wilayah Pangkep bagian pegunungan dan mendirikan markas di Bulu Langi. Pejuang di Mandalle, yang tergabung dalam KRIS Muda menyambut hangat laskar HI di daerahnya. Daya tarik HI ialah kelengkapan senjata mereka. Dalam bulan September 1946, seorang pejuang dari Enrekang ingin bergabung yaitu Andi Sose. Ia diterima oleh Muhammad Syah, pimpinan HI, akan tetapi diminta agar kembali ke daerah asalnya dan membentuk laskar HI disana. Kontak senjata pasukan gabungan HI / KRIS Muda melawan KNIL meletus di Kampung Pettung. Seorang laskar pejuang gugur, bernama La Mappa (dalam bulan Oktober 1946). Dalam Nopember 1946, laskar pimpinan Mamma bertahan mati-matian atas serangan KNIL. Mamma sendiri gugur dalam pertempuran itu. Pasukan HI yang selalu mobiele dalam operasinya, sulit dijebak oleh musuh. Januari 1946, Pimpinan HI

mengikuti konferensi di Paccekke atas undangan Mayor Andi Mattalatta, berdasar mandat dari Panglima Jenderal Soedirman. Selama di Mandalle-Pangkep, Pasukan HI bersama KRIS Muda dan Banteng Indonesia Sulawesi (BIS) melakukan kontak senjata dengan musuh tak kurang 20 kali dari September 1946 s.d. Maret 1947. Tak banyak yang tahu bahwa Pulau Kalu-kalukuang, Liukang Kalmas banyak memberikan andil bagi keberhasilan perjuangan kemerdekaan RI, khususnya di Sulawesi Selatan. Pulau yang berjarak 185, 82 mil dari ibukota Pangkep itu di era revolusi fisik, dijadikan basis perjuangan/tempat persinggahan yang aman dan strategis bagi para pejuang kemerdekaan baik dari Pulau Jawa maupun dari Sulawesi Selatan sendiri. Sebut saja ekspedisi TRIPS (Tentara Rakyat Indonesia Persiapan Sulawesi) dibawah pimpinan Mayor Johan Dg Mangung yang bermarkas di Lawang, Jawa Timur beberapa kali melakukan ekspedisi ke Sulawesi Selatan pada tahun 1947 dengan menggunakan Perahu Lete' khas buatan orang Pulau Kalu-kalukuang. Dari sekian banyak ekspedisi itu, salah satu yang terkenal adalah ekspedisi dibawah pimpinan Kapten A Hasan Rala (mantan Bupati Maros) dengan menggunakan Perahu Lete', yang bernama Kapten Pahlawan Laut (Kapten Baru) dari Pulau Kalu-Kalukuang. Kapal itu milik Hj St Hawa yang diawaki oleh suaminya sendiri H Bakkar Puang Menda sebagai nakhoda dengan dibantu 6 orang sawi yakni Baco, Sehe, Tangnga, Kadir, Pudding dan Lanuddin. Ekspedisi ini berjumlah 36 orang pejuang Sul-Sel, diantaranya Lettu AA Rifai dan Letda Achmad Lamo (mantan Gubernur Sul-Sel). Ekspedisi ini berangkat pada 28 Januari 1947 dari Bondowoso, singgah di Pulau Kalu-kalukuang pada 1 Februari 1947. Setelah istirahat beberapa hari, perjalanan dilanjutkan dan singgah di CempaE, Barru pada 16 Februari 1947. Sebagai bukti keikut-sertaan rakyat pulau Kalu-kalukuang (Liukang Kalmas) dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, sampai sekarang Perahu Lete' yang pernah dipakai dalam ekspedisi TRIPS tersebut diabadikan di Museum ALRI, Surabaya. Perlawanan di pulau – pulau kecil dilakukan oleh PPNI / ALRI yang dibentuk oleh Ali Malaka, Abdul Khalik dan Abdul Muthalib dalam bulan Oktober, diresmikan pada 4 Nopember 1946. Pusat laskar di Pulau Sarappo Lompo. Selain melakukan perlawanan, anggota PPNI / ALRI juga mengatur penyerangan para pejuang Sul-sel ke Jawa dan Kalimantan, meski saat itu persenjataan sangat terbatas. Awal Maret 1947, satu peleton TRIPS dari Jawa, berangkat dari Purbalingga, tiba di Daerah Pangkep. Sebagian dari mereka telah mendarat di pesisir pantai Mandalle, ketika musuh segera datang ketempat pendaratan. Komposisi pasukan TRIPS tersebut : Danton Letda Yos Effendi, wakilnya Letda Taeras Daulat. Para komandan regu : Coni, Samaila dan La Combalang. Senjata yang dibawa hanya 41 pucuk, terdiri dari 1 pucuk mortar 3 inci, 2 pucuk owengun, 2 pucuk stengun, 2 pucuk pistol colt, dan 34 pucuk senjata karaben. Bawaan lainnya berupa 50 karung gula pasir dan 20 peti granat tangan. Suatu tipuan licik KNIL sempat memerdaya pasukan TRIPS. KNIL mengibarkan bendera merah putih mendekati pantai, dimana pendaratan akan dilaksanakan. Melihat “kawan” sementara menyambut, Yos Effendi memerintahkan pletonnya mendarat. Ketika itu juga, serangan KNIL dilancarkan. TRIPS sadar, bahwa para penyambut ternyata adalah musuh. Kontak senjatapun akhirnya berlangsung dari pukul 18.00 sampai pukul 22.00. Dua orang pejuang gugur. Berikut seorang awak perahu tewas. Mereka yang masih berada diatas perahu segera menghindar dari tempat itu. Kemudian berlayar kembali ke Jawa.

Sejarah Pemerintahan Daerah

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pangkajene dan Kepulauan belum bersatu dalam satu wilayah pemerintahan. Pangkajene dengan daratannya berstatus Onderafdeeling dengan nama ‘ Onderafdeeling Pangkajene ’ dibawah taktis ‘Afdeeling Makassar ’ dengan 7 adat gemenschap yaitu : Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle dan Balocci. Onder afdeeling Pangkajene waktu itu berada dibawah pengawasan seorang Gezaghebber setingkat Controleur yang berkedudukan di Pangkajene, sedang adat-adat gemenschap dipercayakan kepada karaeng – karaeng. Wilayah kepulauan sebagai bagian dari Stadsgemente Makassar, dikepalai oleh Kepala Distrik Makassar yang wilayah meliputi : Pulau – pulau ‘Spermonde’ , terdiri dari 57 pulau, Kalu-kalukuang Group terdiri dari 8 pulau, Postelion dan Paternoster terdiri dari 52

pulau. Pulau-pulau tersebut disusun berkelompok disesuaikan jangkauan geografisnya serta diperintah oleh seorang Gallarang, yang statusnya sama dengan 'Kepala Kampung'. Di masa pemerintahan Jepang (1942 – 1945), Sistem pemerintahan di Pangkajene tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat gemeenschap dinamai "Gun", dikepalai 'Guntjo', dikoordinir oleh 'Guntjo Sodai' dari Indonesia dibawah taktis Bunken Kanrikan dari Jepang. Sedang pulau tetap dalam wilayah ' Stadsgemente Makassar' dengan penyebutan "Makassar Si", dikepalai 'Makassar Sitjo' dan Distrik Makassar disebut "Makassar Gun", dikepalai "Makassar Guntjo". Dengan Staatsblad 1946 / 17 Daerah – daerah bekas Rechtstreeks Bestuursgebied termasuk Onderafdeeling Pangkajene dibentuklah swapraja baru (Neo Zelfsbestuur), terdiri dari gabungan adat gemenschap . Wilayah kepulauan, mulai dipisah dari Gemente Makassar dengan Ketua Dewan Hadat Abdul Rahim Dg Tuppu, mantan Kepala District Makassar dengan anggota hadat : Gallarang Balang Lompo, Gallarang Barrang lompo, Gallarang Sapuka, Gallarang Salemo, Gallarang Kalu-kalukuang, dan Gallarang Kodingareng. UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat RI tetap bertahan meski Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK Mendagri No. Des. 1 / 14 / 4 / 1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah otonom baru setingkat Daerah Swatantra Tingkat II, disusul PP No. 34 / 1952, jo. PP No. 2 / 1952, dibentuklah DAERAH MAKASSAR yang berkedudukan di Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai Daerah Otonom Tingkat II. Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana DAERAH MAKASSAR dipecah menjadi Daerah : Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah-wilayah : (1) Onderafdeeling Pulau – Pulau ; (2) Onderafdeeling Maros ; (3) Onderafdeeling Pangkajene dengan pimpinan Bupati Kepala Daerah Andi Tjatjo. Usaha simplikasi pembentukan daerah – daerah dilanjutkan Pemerintah Pusat RI dengan UU No. 29 Tahun 1959, dimana Pangkep menjadi daerah otonom tingkat II, digabung dengan bekas onderafdeling pulau – pulau, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Pangkep yang membawahi 9 kecamatan, yakni : Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Balocci, Segeri Mandalle, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya dengan Bupati pertama, Mallarangeng Dg Matutu. Kini, Kabupaten Pangkep tidak lagi terdiri dari 9 kecamatan, tapi 12 wilayah kecamatan. Sebagai bagian dari semangat Otonomi Daerah, maka lewat Perda No. 13 / 2000 (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000) telah dibentuk tiga kecamatan baru. Wilayah administrasi pemerintahan Pangkep saat ini meliputi Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Liukang Tupabiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Minasate'ne, Mandalle, dan Kecamatan Tondong Tallasa. Sekilas sejarah penetapan hari jadi kab.pangkep Dasar Pembentukan Sebagaimana catatan otentik yang ada menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Salah satu daerah tingkat II tersebut adalah Kabupaten dati II Pangkajene dan Kepulauan yang sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 termasuk dalam bagian daerah Makassar yang disebut Onderafdeling Pangkajene sebagaimana dimaksud dalam bijblad Nomor 14377 Jls surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur tanggal, 19 Januari 1950 Nomor UPU 1/1/45 JO Tanggal, 20 Maret 1950 Nomor UPU 1/6/23. II. Proses Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangkep Salah satu kebanggaan bagi setiap daerah apabila mengetahui sejarah dan kelahirannya yang memberikan sesuatu makna dan nilai historis dan yuridis yang harus senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakatnya. Bertitik tolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pemuda-pemuda kitayang terhimpun dalam wadah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia kabupatenPangkep terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun masukan-masukan pendapat dari budayawan dan teknokrat dalam suatu Seminar Kelahiran Pangkep yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 27 Maret 1986 dengan menampilkan para nara sumber antara lain :

- Prof. Dr. A.Zainal Abidin Farid, SH.

- Prof. Dr.Syahrudin Kaseng
- Drs.A.Samad Thahir
- Aminullah Lewa BA dan
- AM.Dg. Masiga

Seminar tersebut melahirkan alternatif tentang hari Jadi Pangkep yakni, didasarkan atas tinjauan kesejarahan satu kerajaan tua yang pernah ada di Pangkep yaitu di kecamatan Bungoro yang dikenal dengan kerajaan “Siang” pada masa antara abad 16 sampai abad ke 17. Alternatif lainnya adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis formal yakni dasar hukum pembentukan daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. Bertolak dari hasil seminar tersebut, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah membentuk tim perumus yang bertugas menghimpun dan merumuskan data-data yang otentik dan akurat yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hari jadi Kabupaten Pangkep, namun tim perumus dalam menetapkan Hari Jadi Pangkep atas dasar pertimbangan kesejarahan menemui kendala, oleh karena data data dan informasi tidak cukup dapat mendukung, sehingga tim perumus mencoba memanfaatkan data dan informasi dari sudut pertimbangan yuridis formal yang memberikan dua alternatif yakni, tanggal ditetapkannya surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah UP. 7/2/40-337 tanggal, 28 Januari 1960 tentang pengangkatan Mallarangeng Dg. Matutu sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan yakni pada tanggal, 28 Januari 1960 dan pilihan kedua adalah dari serah terima jabatan Mallarangeng dg. Matutu sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. Dua pilihan inilah yang diajukan oleh tim kepada bapak Bupati kepala daerah untuk menetapkan satu diantaranya untuk dijadikan dasar dalam rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan pembahasan. Berdasarkan dua pilihan yang diajukan tim tersebut, oleh Bupati Kepala Daerah dalam hal ini Bpk. M.R. Natsir menetapkan serahterima jabatan dari Andi Tjatjo kepada Mallarangeng Dg. Matutu sebagai momentum kelahiran Pangkep untuk disampaikan pada DPRD namun masih ditemukan sedikit permasalahan dengan tidak ditemukannya berita acara pelantikan Mallarangeng Dg. Matutu. Berkat keterangan Bpk. Mallarangeng Dg. Matutu secara pribadi bahwa pelantikan tersebut seingat beliau dilaksanakan pada hari Senin sebelum tanggal, 10 Februari dan setelah melihat penanggalan tahun 1960, menunjukkan bahwa hari Senin jatuh pada tanggal 1 dan tanggal 8 Februari 1960.

Hal inilah yang menjadi pengajuan rancangan peraturan daerah (Perda) kepada DPRD Tingkat II Pangkep. Berdasarkan data-data diatas, maka pada tanggal, 10 Februari 1992 rancangan perda tentang Hari Jadi Kabupaten daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan dibahas secara bersama-sama oleh pihak eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna tingkat I di gedung DPRD tingkat II Pangkep. Dalam pembahasan rancangan Perda pihak legislatif cukup berhati-hati dan jeli untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Pangkep, sehingga pembahasannya dilakukan dalam sidang-sidang komisi khusus/gabungan yang menggunakan waktu cukup lama. Berkat upaya dan kesungguhan semua pihak utamanya pihak eksekutif dan legislatif, pemuka masyarakat dan generasi muda akhirnya berhasil ditemukan salah satu arsip yang sangat menentukan penetapan Hari jadi tersebut, berupa arsip pidato/sambutan bupati kepala daerah pertama yaitu Bpk. Mallarangeng Dg. Matutu pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang ke 15 pada tanggal 17 Agustus 1960. Dalam pidato tersebut terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut : “ Sebagaimana kita ketahui pada hari Senin tanggal 8 Februari 1960 pimpinan pemerintahan di daerah ini telah ditimbang terimakan oleh pimpinan lama kepada yang baru.” Atas dasar data otentik itu, akhirnya dipilih dan disepakati bersama pihak eksekutif dan legislatif untuk menetapkan hari jadi kabupaten daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan jatuh pada tanggal 8 Februari 1960 yakni saat pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkep yang pertama yaitu Bpk. Mallarangeng Dg. Matutu secara defacto sebagai pejabat kepala daerah. Untuk itu, maka pada tanggal 9 Juli 1992 dalam sidang paripurna DPRD ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang Perda Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep yakni peraturan daerah nomor 4 tahun 1962 yang menetapkan tanggal, 8 Februari sebagai Hari jadi kabupaten Pangkep. Sebagai proses lanjut atas penetapan Perda tersebut, agar

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka pada tanggal 24 Juli 1962 diajukan pengusulan pengesahannya kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sulsel sebagai pejabat yang mengesahkan. Setelah melalui pemeriksaan secara teliti dan mendalam pada Biro Hukum Setwilda tingkat I dan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya, akhirnya disetujui pengesahan Perda ini dengan surat keputusan Gubernur Tingkat I Sulsel No.100/8/92 tanggal 28 Agustus 1992 dan dicantumkan dalam lembaran daerahkabupaten daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan nomor 7 tahun 1962 seri D Nomor 4. Dengan lahirnya perda tentang hari jadi kabupaten daerah tingkat II Pangkep, maka hal ini menunjukkan tuntutan tanggungjawab kepada seluruh warga masyarakat kabupaten pangkep untuk menjaga dan melestarikan jatidiri daerahnya sebagai suatu yang tidak ternilai dan menjadikannya sebagai suatu kekuatan baru dalam memotivasi diri dalam mempertahankan kesinambungan didaerah ini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara kuantitas, partisipasi politik perempuan dalam pemilu di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam Partisipasi politik serta yang tidak terlibat.

Dibandingkan dengan daerah lain maka perempuan di Kabupaten pangkep dalam hal keterlibatan di dunia politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan masih kurang. Seperti dari data yang terlihat, perempuan yang menduduki jabatan kepala desa hanya ada 16 orang dari 118 desa di Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk anggota DPRD hanya ada 5 orang dari 35 anggota. Hal yang lebih miris juga mengenai pencalonan bupati ataupun wakil bupati

Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tentunya lebih idealnya jika perempuan ikut aktif dalam perumusannya.

Sampai saat ini masyarakat belum melihat sosok perempuan yang memiliki pengaruh besar di Kabupaten Pangkep.

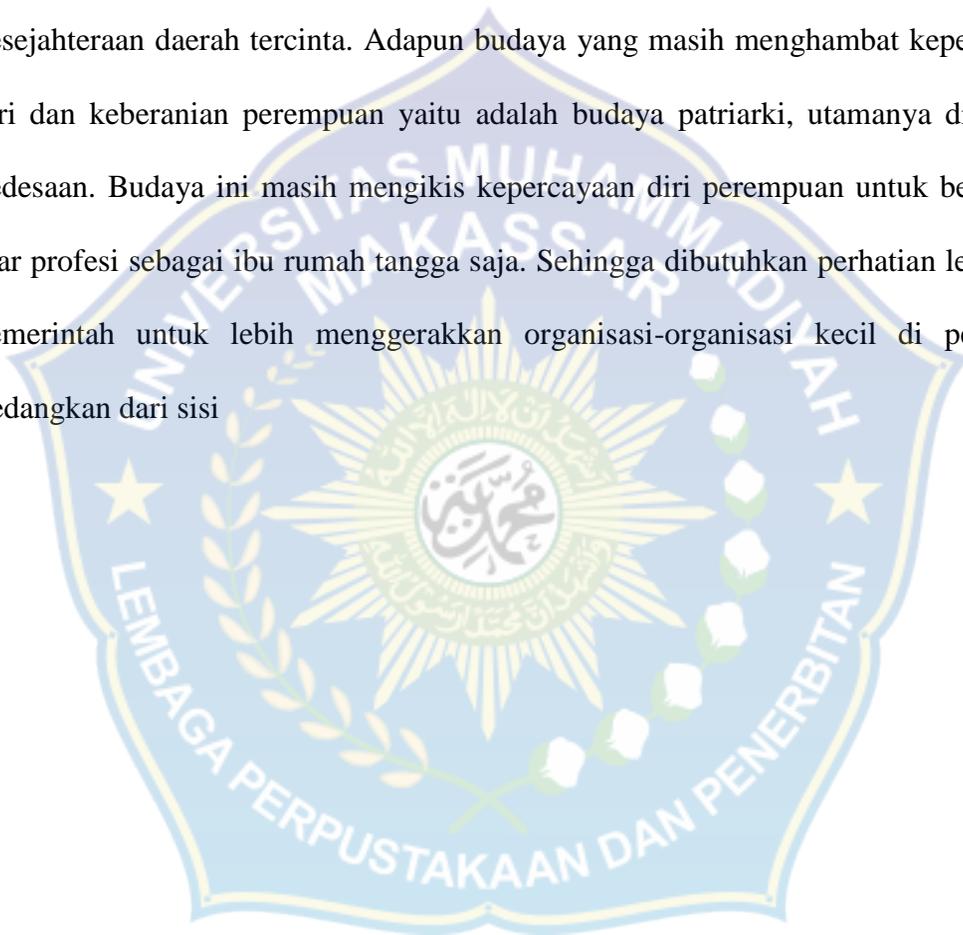
Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Pangkep

Berbagai kebijakan yang ada di negara kita nyatanya telah memberi peluang dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk ikut andil dalam merumuskan kebijakan serta berpartisipasi dalam kemajuan pembangunan negara kita.

Kebijakan tidak untuk menjadikan perempuan memperoleh jabatan dengan cara yang instan, tapi kebijakan diharapkan memberi motivasi bagi perempuan-perempuan seperti halnya perempuan di daerah Pangkep untuk mulai membekalkan diri. dilihat, sejak adanya kebijakan mengenai kuota perempuan di legislatif tingkat daerah, tentunya menampakkan peningkatan jumlah caleg perempuan. Namun nyatanya di Kabupaten Pangkep, partai-partai masih kewalahan mencari sosok perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Tapi selain itu, caleg perempuan diharapkan bukan hanya

sekedar memenuhi kuota tapi dapat benar-benar memberi kontribusi yang baik dalam perumusan kebijakan nantinya.

Berbicara mengenai budaya, saat ini sudah tak nampak lagi adanya deskriminasi atau marginalisasi seperti zaman dahulu kala, perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan berkarya secara profesional. Menurut hasil wawancara, tidak ada satu nilai atau tradisi yang mengikat perempuan di Kabupaten Pangkep untuk tampil di publik, bahkan semboyan daerah yang paling dikenal “MARADEKA TO PANGKEPE ADENA NAPOPUANG”, seharusnya lebih dipahami agar menjadi orang-orang merdeka baik itu laki-laki maupun perempuan untuk berjuang demi kesejahteraan daerah tercinta. Adapun budaya yang masih menghambat kepercayaan diri dan keberanian perempuan yaitu adalah budaya patriarki, utamanya di daerah pedesaan. Budaya ini masih mengikis kepercayaan diri perempuan untuk bekerja di luar profesi sebagai ibu rumah tangga saja. Sehingga dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk lebih menggerakkan organisasi-organisasi kecil di pedesaan. Sedangkan dari sisi



akseptabilitas (tingkat penerimaan masyarakat) terhadap keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Pangkep bukanlah sebuah penghalang, perempuan-perempuan mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat termasuk perempuan yang telah terlibat dalam jabatan politik selama ini telah mendapat dukungan dari masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat selama dirinya menjabat.

Tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi sangat mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam politik. Bekal ini sangat penting dimiliki untuk selanjutnya diasah terus menerus. Perempuan-perempuan di Kabupaten Pangkep masih memiliki pengalaman organisasi yang amat kurang, contohnya saja beberapa kepala desa hanya berbekal melanjutkan sosok suami sebagai kepala desa periode sebelumnya tanpa pengalaman organisasi serta tingkat pendidikan yang matang. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik, kemampuan atau kapabilitas harus diasah dari bawah misalnya dengan giat melibatkan diri dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, tidak berhenti menuntut ilmu serta melatih jiwa kepemimpinannya. Dapat dilihat pula bahwa LSM-LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan pendidikan politik masih kurang.

B. Saran

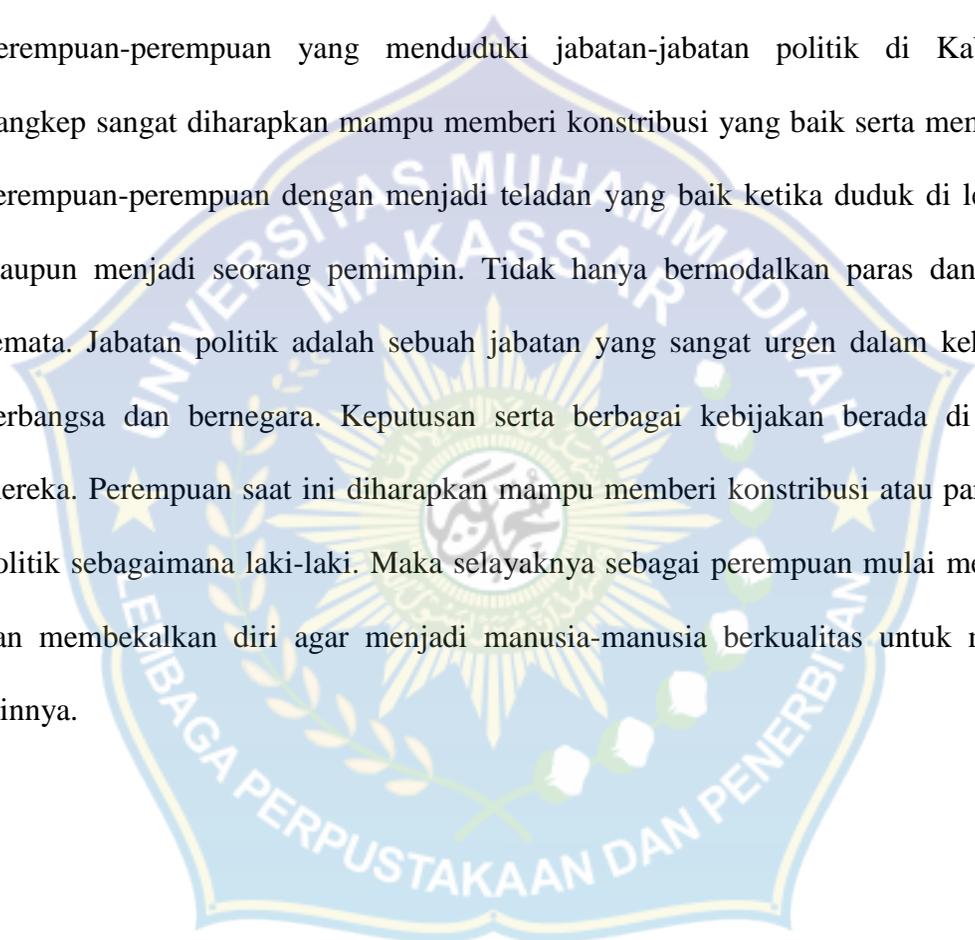
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Pangkep, maka telah dipaparkan bahwa kuantitas perempuan yang menempati jabatan politik seperti kepala desa serta anggota legislatif memang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepercayaan diri serta keberanian perempuan yang masih sangat kurang, pengalaman organisasi serta tingkat pendidikan yang masih kurang, faktor keuangan, serta kurangnya minat untuk melibatkan diri dalam partai dan lebih memilih untuk berwirausaha.

Ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh kaum perempuan saat ini. Misalnya dengan mulai membekalkan diri sejak jauh hari sebelum maju dalam jabatan politik, seperti dengan melibatkan diri dalam organisasi-organisasi atau LSM-LSM yang ada di daerah. Segala hal yang ingin dicapai harus diasah dari bawah, bekal organisasi dan pendidikan sangat dibutuhkan agar perempuan bisa memaksimalkan potensinya dalam jabatan-jabatan politik. Perempuan juga kiranya tidak menutup diri dan

membuka diri dengan dunia sosial serta membuka jaringan yang lebih luas. Selain dari itu, dilihat dari LSM-LSM yang ada di daerah, serta organisasi-organisasi yang ada di pedesaan, pihak pemerintah juga kiranya memberi perhatian lebih utamanya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan. Seperti dengan lebih menghidupkan lagi PKK di berbagai desa.

Sosialisasi politik atau pendidikan politik harus menyentuh ke semua kalangan, seperti halnya kebijakan kuota perempuan di legislatif jangan hanya disosialisasikan di wilayah perkotaan tapi juga di pedesaan agar pemahaman mengenai kebijakan itu lebih merata.

Perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik di Kabupaten Pangkep sangat diharapkan mampu memberi kontribusi yang baik serta memotivasi perempuan-perempuan dengan menjadi teladan yang baik ketika duduk di legislatif ataupun menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya bermodalkan paras dan materi semata. Jabatan politik adalah sebuah jabatan yang sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan serta berbagai kebijakan berada di tangan mereka. Perempuan saat ini diharapkan mampu memberi kontribusi atau partisipasi politik sebagaimana laki-laki. Maka selayaknya sebagai perempuan mulai mengasah dan membekalkan diri agar menjadi manusia-manusia berkualitas untuk manusia lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, Thriwaty. 2004. *Partisipasi Politik Elit Agama Islam di Kota Magelang*. Usul penelitian. FIS Unnes.
- Affan. 1990. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*. Solo: Ramadhani Huntinton.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Depdikbud. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Gaffar,
- Kamaruddin. 2003. *Partai Politi Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Visi
- Lexy J. Moelong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maran, Raga, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Mathew B, dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- M. Darwin, Muhajir. 2005. *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Publishing Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah Penelitian Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rasyid Ridha, Muhammad. 2004. *Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat dan Partisipasinya di Ruang Politik Publik*. Bandung: Penerbit Hikmah
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Solo: Era Intermedia*
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Samuel P. dan Neslon, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta International IDEA Conference Report 2002, Strengthening Women's Political Participation In Indonesia,
- Sanit, Ari 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali

- Sastroatmodjo, Sudijono.1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Shafiyah, Amatullah dan Soeripno, Haryati. 2003. *Kiprah Politik Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Suparlan dan Suyanto, Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat, dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Takariawan, Cahyadi.. 2002. *Fiki Politi Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Tiga Lentera Utama
- Ulfaizah.2006. *Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tengguli Kecamatan Bangsa Kabupaten Jepara*. Semarang: FIS Unnes
- Verayanti, Lany et al.2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Matrilineal*. Padang: LP2M
- Widyani Soetjipto, Ani.2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas



No.	Hari/ Tanggal	Pertanyaan	Nama Responden	Hasil wawancara	Tanda tangan
1.		Bagaimana bentuk partisipasi politik perempuan			
2.		Bagaimana KPU Memberikan perilaku terhadap perempuan sehingga memberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi			
3.		Bagaimana pendapat anda tentang kehadiran perempuan di panggung demokrasi yang sudah mulai bermunculan saat ini disbanding tahun tahun sebelumnya?			
4.		Menurut anda bagaimana anda melihat sebuah kepemimpinan seorang perempuan?			
5.		Bagaimana KPU dalam menerima sistem pencalonan perempuan dalam pesta demokrasi?			
6.		Menurut anda sejauh mana penting dan dibutuhkannya partisipasi perempuan di kabupaten pangkep?			
7.		Menurut anda sejauh mana pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keputusan dalam sebuah daerah?			

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



FAISAL, lahir di pulau balang lombo kel. Mattiro sompe kec. Liukang tupabbiring kab. Pangkep pada tanggal 06 juli 1991 anak ke-4 dari 6 bersaudara, buah kasih sayang pasangan Ayahanda sayado dengan Ibunda almarhumah samina. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 26 pulau balang lombo, pada tahun 1997, dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP negeri 1 pulau balang lombo, tahun 2003 dan tamat pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 pulau balang lombo, pada tahun 2006 hingga akhirnya tamat pada tahun 2009 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1). Tahun 2014 Atas berkah dan rahmat Allah SWT, dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul Skripsi "***PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU KADA KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN***".